



**DAMPAK PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN  
BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) TERHADAP PEREKONOMIAN  
MASYARAKAT DESA SABRANG KECAMATAN AMBULU  
KABUPATEN JEMBER**

(Studi Kasus Lembaga Masyarakat Desa Hutan Harapan Makmur)

*The Impact of The Community Forest Management Program (PHBM) on The  
Economy of The Sabrang Village Community in Ambulu District  
Jember Regency*

*(Case Study on The Forest Village Community Institution Harapan Makmur)*

**SKRIPSI**

oleh  
**Dimas Baskoro**  
**NIM 140910201042**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**



**DAMPAK PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN  
BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) TERHADAP PEREKONOMIAN  
MASYARAKAT DESA SABRANG KECAMATAN AMBULU  
KABUPATEN JEMBER**

(Studi Kasus Lembaga Masyarakat Desa Hutan Harapan Makmur)

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
(S1) dan mencapai gelar Sarjana Administrasi

oleh  
**Dimas Baskoro**  
**NIM 140910201042**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Mending Ibuku tercinta Sri Rahajoe, atas doa, kasih sayang, sokongan, serta semangatnya yang tidak akan pernah habis dalam batin dan jiwaku;
2. Orang tuaku Rachmawati S.T. atas doa, dukungan, perhatian serta kepercayaannya selama ini;
3. Mending Bapakku Ir. Wage Oentoeng Soeprijadi, semangatmu akan selalu berkobar;
4. Kakakku Sapta Noegroho S.P. untuk doa, perhatian, dukungan, nasihat-nasihat serta kepercayaan yang diberikan kepadaku;
5. Orang tuaku Drs. Lies Sunarto yang selalu kutunggu kehadirannya;
6. Para pejuang pelestari keanekaragaman hayati Indonesia di seluruh penjuru negeri;
7. Seluruh Guru yang mengajarku tentang arti sebuah kehidupan, mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta membimbingku kepada jalan yang lurus;
8. Almamater tercinta, Administrasi Negara FISIP Universitas Jember.

**MOTO**

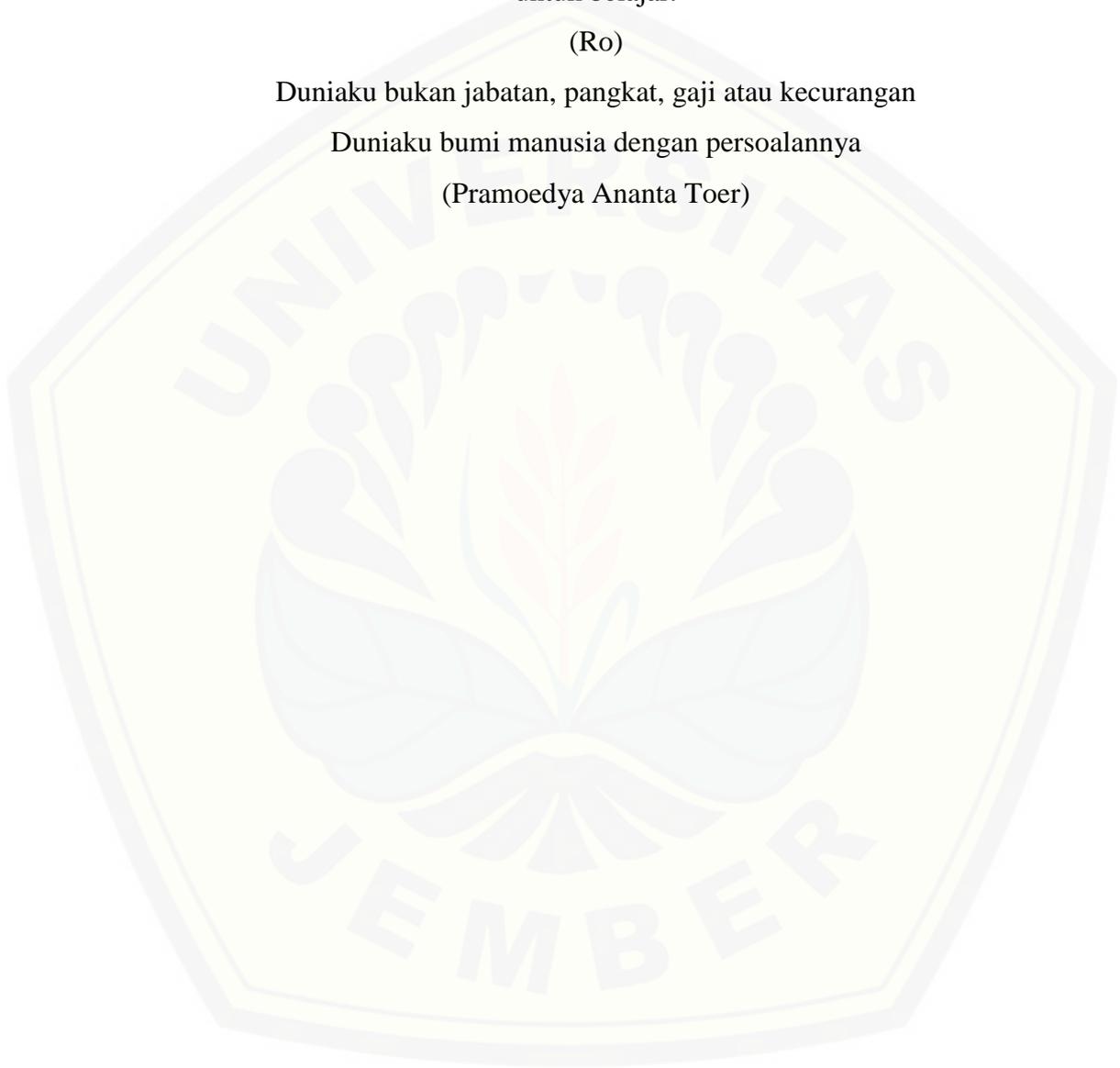
Tidak penting seperti apa dirimu dilahirkan, Tidak penting bagaimana nasib membawamu. Karena yang paling penting dalam hidup ini, hanyalah kemauan untuk belajar.

(Ro)

Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji atau kecurangan

Duniaku bumi manusia dengan persoalannya

(Pramoedya Ananta Toer)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Dimas Baskoro

NIM : 140910201042

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “Dampak Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember (Studi Kasus Lembaga Masyarakat Desa Hutan Harapan Makmur)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan seumbernya, belum pernah diajukan kepada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Mei 2019

Yang menyatakan,

Dimas Baskoro

NIM. 140910201042

**SKRIPSI**

**DAMPAK PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN  
BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) TERHADAP PEREKONOMIAN  
MASYARAKAT DESA SABRANG KECAMATAN AMBULU  
KABUPATEN JEMBER**

(Studi Kasus Lembaga Masyarakat Desa Hutan Harapan Makmur)

*The Impact of The Community Forest Management Program (PHBM) on The  
Economy of The Sabrang Village Community in Ambulu District Jember  
Regency*

*(Case Study on The Forest Village Institutions Community Harapan Makmur)*

oleh  
Dimas Baskoro  
NIM 140910201042

**Pembimbing**

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Boedijono, M.Si  
Dosen Pembimbing Anggota : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Dampak Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember (Studi Kasus Lembaga Masyarakat Desa Hutan Harapan Makmur)” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 28 Mei 2019

Tempat : Ruang Ujian Skripsi Jurusan Administrasi FISIP UNEJ

Jam : 09.00 WIB

Tim Penguji

Ketua,

Anggota

Rachmat Hidayat S.Sos, MPA., Ph.D.  
NIP 198103222005011001

Nian Riawati, S.Sos, MPA  
NIP 198506092015042002

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Drs. Boedijono M.Si  
NIP 196103311989021001

M. Hadi Makmur S.Sos.M.AP  
NIP 197410072000121001

Mengesahkan,  
Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes  
NIP 19610608198802001

## RINGKASAN

**“Dampak Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember (Studi Kasus Lembaga Masyarakat Desa Hutan Harapan Makmur)”** Dimas Baskoro, 140910201042; 2019: 102 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Isu-isu tentang penanggulangan penurunan daya dukung lingkungan telah menjadi *concern* dari berbagai organisasi multinasional serta negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. PHBM merupakan salah satu program yang telah diperjuangkan semenjak tahun 2001. Program PHBM merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan untuk tujuan konservasi serta pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat desa hutan yang mandiri untuk mendukung terciptanya hutan yang lestari. Dalam penelitian ini peneliti memilih Desa Sabrang sebagai tempat yang menjadi fokus penelitian. Desa Sabrang dipilih karena telah dipetakan sebagai daerah dengan tingkat pembalakan liar dan pencurian kayu tertinggi di Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Jember. Dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk menganalisis dampak program PHBM terhadap perekonomian masyarakat Desa Sabrang melalui dua indikator utama yaitu peningkatan usaha produktif masyarakat serta peningkatan daya beli masyarakat sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam Pedoman PHBM yang mana merupakan bagian dalam IPM terhadap ukuran hidup layak.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menangkap fenomena sosial secara natural tanpa dibatasi oleh ukuran yang ketat. *Purposive sampling* peneliti gunakan sebagai teknik penentuan informan penelitian yang akan terus berkembang sampai data yang dikumpulkan dianggap jenuh. Data yang diperoleh peneliti kemudian diolah

dan dianalisis sebagai hasil dari penelitian. Peneliti menggunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Haberman dengan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, model data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa program PHBM telah memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat Desa Sabrang terkhusus kepada anggota LMDH Harapan Makmur. Dari hasil penelitian diperoleh empat dampak utama dari pelaksanaan PHBM di Desa Sabrang, pertama bertambahnya lapangan pekerjaan, kedua meningkatnya pendapatan, ketiga meningkatnya produktivitas masyarakat dan keempat meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Memang banyak evaluasi dari pelaksanaan program ini, beberapa diantaranya masih adanya praktik-praktik pungli, ego sektoral dari masing-masing elemen di dalam program, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Meskipun, telah terjadi banyak penurunan kejadian perambahan hutan serta pencurian kayu milik Perum Perhutani, namun peran aktif dari lembaga terkait masih diperlukan dalam membimbing dan menindak tegas oknum-oknum yang menghambat proses perbaikan dari program ini.

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat tuhan gusti Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Dampak Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember (Studi Kasus Lembaga Masyarakat Desa Hutan Harapan Makmur)**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

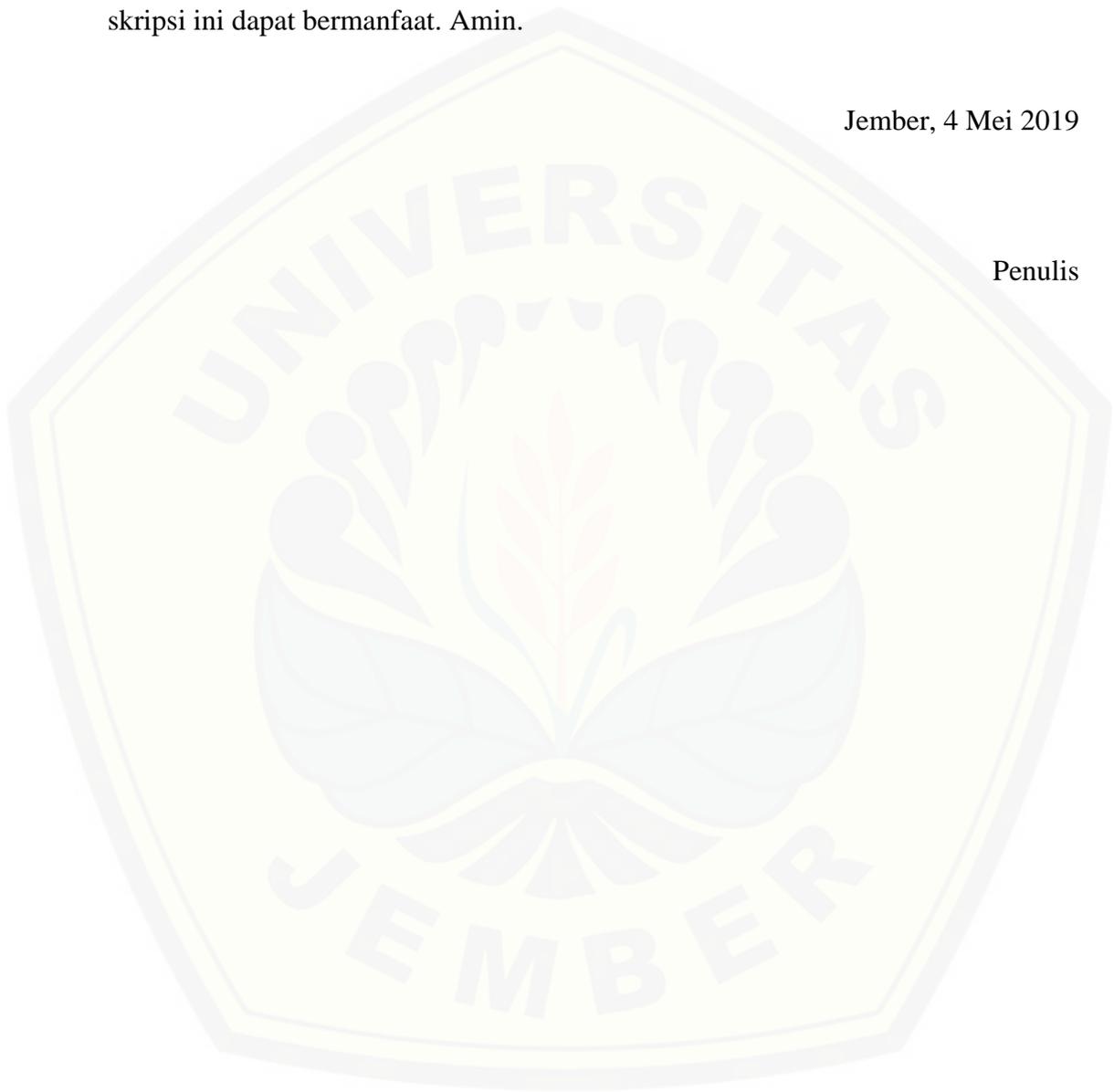
1. Dr. Ardiyanto, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes Selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Akhmad Toha, M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Dr. Sutomo, M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama dan M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran untuk membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Drs. Anwar, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis berstatus mahasiswa;
7. Seluruh Dosen beserta segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;

8. Bapak Harun Al-Rasyid selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Harapan Makmur;
9. Ibu Yani selaku Kepala Bagian SDM Perum Perhutani KPH Jember; Bapak Agus Sulaiman selaku Kepala Bagian Komunikasi Perum Perhutani KPH Jember, serta Bapak Bambang selaku Kepala Bagian Danru Polhutan Perum Perhutani KPH Jember;
10. Bapak Kuseman, Bapak Wagiman, Bapak Fasholi dan istri, Bapak Muji, Bapak Agus, Bapak Husen, Bapak Siata, Bapak Asrori, Bapak Subiantoro, Mas Tedi, Ibu Juma'ani, Ibu Jumairah, Ibu Hari, Ibu Ratna, Mbak Indah, serta seluruh masyarakat Desa Sabrang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalian adalah pejuang keluarga, prinsip dan idealisme masing-masing;
11. Eka Mardika Putri yang selalu menjadi pengingat dan penyemangat dalam penulisan skripsi ini, semoga engkau selalu diberikan kesehatan;
12. Keluarga Besar Rumah Biru Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) FISIP UNEJ serta Sahabat-sahabat yang selalu menjadi tempat untuk belajar hidup. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas nilai dan pembelajaran yang kalian berikan. Semoga PMII akan selalu menjadi salah satu pilihan gerbang ideologis dalam kaderisasi bangsa yang selalu merawat keberagaman dan toleransi;
13. Seluruh pejuang lingkungan, penjaga keanekaragaman hayati Indonesia, para penegak hukum yang dengan tulus dan jujur melindungi hutan dan satwa, para aktivis yang masih lantang menyuarakan perang terhadap perusak alam, seluruh korban konflik tanah yang terus digempur oleh para pemilik modal, terimakasih mau berjuang dan memantik hati anak muda ini;
14. Seluruh keanekaragaman hayati yang tuhan berikan bagi negeri ini dan kekuatan-kekuatan besar yang akan merusaknya, terimakasih, karena juga berkat kalian, lahir seorang anak yang akan menghimpun kekuatan untuk melawan;
15. Dan untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis telah berusaha dalam menyempurnakan skripsi ini dengan mendengarkan saran dan kritik yang membangun dari segenap pihak. Semoga Tuhan senantiasa membalas segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Akhirnya terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Jember, 4 Mei 2019

Penulis



**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>MOTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>PRAKATA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik .....	12
2.1.1 Kebijakan Publik .....	12
2.1.2 Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik .....	15
2.1.3 Jenis Kebijakan Publik .....	15
2.1.4 Tahapan Proses Kebijakan Publik .....	16
2.2 Konsep Evaluasi Kebijakan .....	17
2.2.1 Pendekatan Evaluasi .....	17
2.3 Dampak Kebijakan .....	18
2.4 Ekonomi Masyarakat Hutan .....	20
2.5 Program PHBM .....	21

2.6 Indikator Keberhasilan Program .....	24
<b>BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	27
3.2 Fokus Penelitian .....	28
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
3.4 Data dan Sumber Data .....	29
3.5 Penentuan Informan Penelitian .....	30
3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data .....	31
3.6.1 Teknik Wawancara .....	32
3.6.2 Teknik Observasi .....	33
3.6.3 Teknik Dokumentasi.....	33
3.6.4 Studi Kepustakaan .....	34
3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data .....	34
3.7.1 Perpanjangan Keikutsertaan.....	34
3.7.2 Ketekunan Pengamatan .....	35
3.7.3 Triangulasi .....	35
3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data .....	36
3.8.1 Pengumpulan Data .....	37
3.8.2 Reduksi Data .....	38
3.8.3 Penyajian Data.....	38
3.8.4 Menarik Kesimpulan/Verifikasi.....	38
<b>BAB 4. PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Deskripsi Daerah Penelitian .....	39
4.1.1 Gambaran Umum Desa Sabrang .....	39
4.1.2 Profil Perum Perhutani .....	42
4.1.3 Perum Perhutani KPH Jember .....	43
4.1.4 Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Jember .....	44
4.1.5 Wilayah Kerja Perum Perhutani KPH Jember .....	51
4.1.6 LMDH Harapan Makmur .....	53
4.2 Program PHBM di Desa Sabrang .....	55
4.2.1 Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pokok .....	56

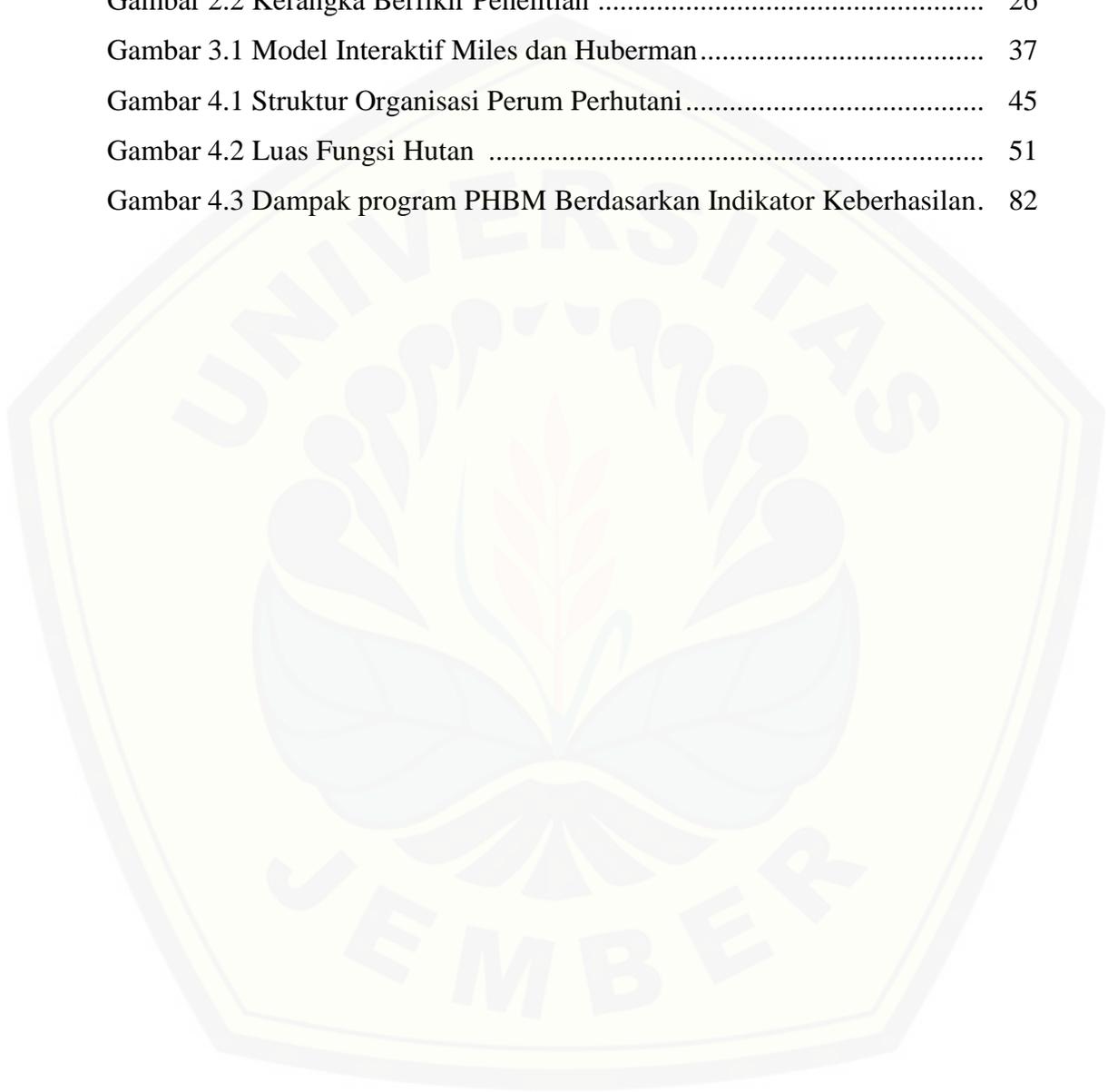
4.2.2 Kegiatan Pemanenan Tanaman Pokok .....	60
4.2.3 Kegiatan Pengamanan .....	61
4.2.4 Kegiatan Tumpangsari .....	62
4.3 Keadaan Masyarakat Sabrang Sebelum Adanya PHBM .....	64
4.4 Keadaan Masyarakat Sabrang Setelah Pelaksanaan PHBM ..	66
4.4.1 Bertambahnya Lapangan Pekerjaan .....	67
4.4.2 Meningkatnya Produktifitas .....	78
4.4.3 Meningkatnya Pendapatan .....	79
4.4.4 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat .....	80
<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....	83
5.1 Kesimpulan .....	83
5.2 Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	85
<b>LAMPIRAN</b> .....	89

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Kejadian Bencana Alam 2017 .....	2
Tabel 1.2 Daerah Dengan Tingkat Kebencanaan Tertinggi .....	2
Tabel 1.3 Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Pulau Jawa .....	3
Tabel 3.1 Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif .....	34
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Sabrang .....	40
Tabel 4.2 Penggunaan Lahan Desa Sabrang .....	40
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Dalam Wilayah Dusun di Desa Sabrang .....	41
Tabel 4.4 Sumberdaya Manusia Berdasarkan Matapencaharian .....	41
Tabel 4.5 Peningkatan Produktivitas Anggota LMDH Dampak PHBM .....	78
Tabel 4.6 Peningkatan Pendapatan Anggota LMDH Dampak PHBM .....	80
Tabel 4.7 Kondisi Rumah Anggota LMDH Dampak PHBM .....	80
Tabel 4.8 Kepemilikan Aset Anggota LMDH Dampak PHBM .....	81

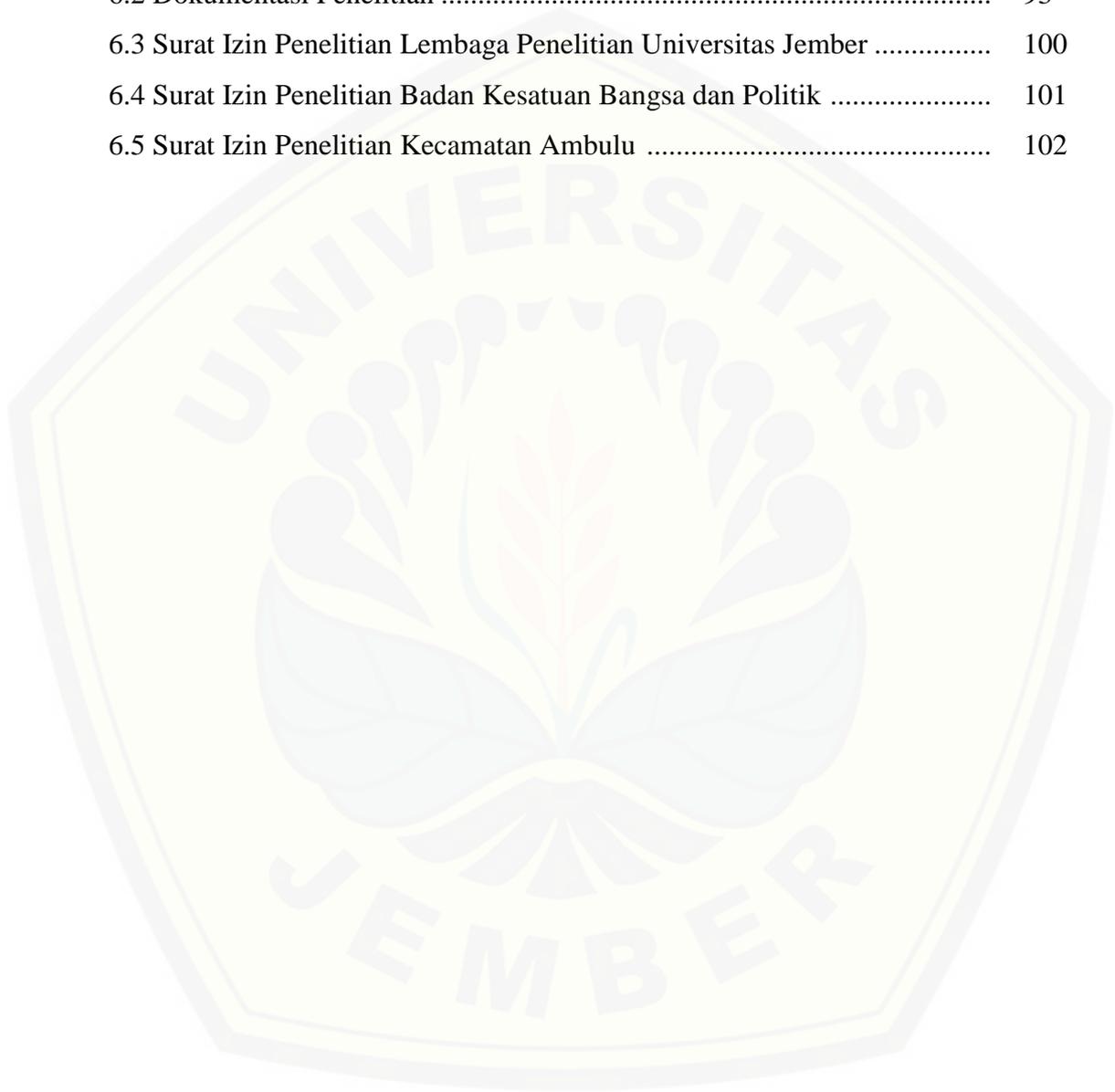
**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik .....	16
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Penelitian .....	26
Gambar 3.1 Model Interaktif Miles dan Huberman.....	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perum Perhutani.....	45
Gambar 4.2 Luas Fungsi Hutan .....	51
Gambar 4.3 Dampak program PHBM Berdasarkan Indikator Keberhasilan.	82



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
6.1 Pedoman Wawancara .....	90
6.2 Dokumentasi Penelitian .....	93
6.3 Surat Izin Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Jember .....	100
6.4 Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	101
6.5 Surat Izin Penelitian Kecamatan Ambulu .....	102



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Program PHBM merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan untuk tujuan konservasi serta pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat desa hutan yang mandiri untuk mendukung terciptanya hutan yang lestari. Dalam penelitian ini peneliti memilih Desa Sabrang sebagai tempat yang menjadi fokus penelitian. Desa Sabrang dipilih karena telah dipetakan sebagai daerah dengan tingkat pembalakan liar tertinggi di Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Jember (AntaraNews 30 Desember 2017). Dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk menganalisis dampak program PHBM terhadap perekonomian masyarakat Desa Sabrang melalui dua indikator utama yaitu peningkatan usaha produktif masyarakat serta peningkatan daya beli masyarakat sesuai dengan indikator keberhasilan dalam Indeks Pembangunan Manusia pada dimensi ukuran hidup layak. Analisis tersebut diharapkan mampu memberikan informasi kepada pihak yang terkait sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan program pada sektor kehutanan kedepannya.

Pada hakekatnya, kebijakan hadir sebagai upaya solutif bagi penyelesaian masalah publik. Menyoal permasalahan tata kelola kehutanan di Indonesia maka ada dua permasalahan serius yang *urgent* untuk segera diselesaikan. Permasalahan tersebut adalah perihal kerusakan sumber daya hutan dan tingginya angka kemiskinan masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar hutan. Perlu untuk diketahui bahwa Indonesia telah kehilangan 40% luas kawasan hutannya (Kompas 11 September 2015). Kehilangan luas kawasan hutan tersebut kemudian harus

dibayar dengan berbagai dampak ekologis yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama tahun 2017 saja tercatat dampak yang telah ditimbulkan dari kejadian bencana di Indonesia sejumlah 377 orang meninggal dan hilang, 1.005 orang luka-luka dan 3.494.319 orang mengungsi dan menderita. Tidak hanya itu, kerusakan fisik akibat bencana meliputi 47.442 unit rumah rusak, 365.194 unit rumah terendam banjir, dan 2.083 unit bangunan fasilitas umum rusak. Dari sejumlah dampak kejadian bencana pada tahun 2017 tersebut, bencana yang diakibatkan oleh menurunnya daya dukung lingkungan dalam menghadapi pengaruh cuaca adalah sebagian yang dominan.

Tabel 1.1 Kejadian Bencana tahun 2017

No	Jenis Kejadian	Jumlah Kejadian
1	Banjir	787
2	Puting Beliung	716
3	Tanah Longsor	614
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	96
5	Banjir dan Tanah Longsor	76
6	Kekeringan	19
7	Gempa Bumi	20
8	Gelombang Pasang dan Abrasi	11
9	Letusan Gunung Berapi	2

Sumber : BNPB tahun 2017, data diolah

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2017 adalah bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca seperti banjir, longsor dan puting beliung. Fenomena ini menurut BNPB diakibatkan oleh perubahan iklim global, degradasi lingkungan dan luasnya lahan kritis sehingga menyebabkan daerah makin rentan terhadap bencana. Degradasi lingkungan dengan semakin meluasnya lahan kritis merupakan pemicu dari kehancuran ekologi yang harus segera ditekan.

Tabel 1.2 Daerah dengan Tingkat Kebencanaan Tertinggi

No	Daerah	Kejadian Bencana
1	Jawa Tengah	600

2	Jawa Timur	419
3	Jawa Barat	316
4	Aceh	89
5	Kalimantan Selatan	57

Sumber: BNPB 2017

Berdasarkan data tersebut Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat menjadi daerah dengan tingkat kebencanaan tertinggi. Degradasi lingkungan dan semakin luasnya lahan kritis, ditengarai menjadi penyebab pulau Jawa rentan terhadap bencana. Pada UU No 41 pasal 18 ayat 2 sebenarnya telah diatur bahwa luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Hal ini digunakan sebagai acuan, bagaimana suatu daerah dapat mempertahankan fungsi ekologisnya dengan baik melalui batasan minimal yang telah ditetapkan. Namun demikian, Jawa sebagai sebuah pulau, ternyata berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya memiliki luas kawasan hutan sekitar 3.532.600 hektar dari keseluruhan luas Pulau Jawa yang memiliki luas 13.210.700 hektar. Artinya, rasio luas kawasan hutan terhadap luas daratan Pulau Jawa sekitar 26,7%, lebih rendah dari batasan minimal berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini kembali diperparah dengan luasnya lahan kritis yang ada di Pulau Jawa.

Tabel 1.3 Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Pulau Jawa Tahun 2013

No	Provinsi	Luas dan Penyebaran Lahan Kritis (Ribuan Hektar)		
		Kritis	Sangat Kritis	Jumlah
1	DKI Jakarta	-	-	-
2	Jawa Barat	302	41	343
3	Jawa Tengah	106	5	111
4	DI Yogyakarta	25	1	26
5	Jawa Timur	485	737	1.222
6	Banten	33	4	37
Total				1.729

Sumber: BPS 2013

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa total lahan yang masuk dalam kategori kritis di Pulau Jawa mencapai angka 1.729.000 hektar. Ini berarti,

dari 26,7% luas kawasan hutan yang ada di Pulau Jawa, 48,9% diantaranya dalam kondisi kritis. Artinya, hanya 13,6% kawasan hutan di pulau Jawa yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Meninjau permasalahan sektor kehutanan di pulau Jawa memang sangatlah kompleks. Disamping mengalami krisis ekologis, hutan di pulau Jawa juga didera dengan berbagai macam permasalahan sosial. Tercatat, dari sekitar 25.863 desa yang dikategorikan sebagai desa hutan di Indonesia, sekitar 6.807 desa diantaranya terletak di pulau Jawa (Liputan6 20 Desember 2016). Sejauh ini stigma yang terbangun bahwa masyarakat desa hutan lekat dengan permasalahan kemiskinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari laman kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, sekitar 48,8 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan hutan dan 10,2 juta jiwa diantaranya masuk dalam kategori miskin. Fakta tersebut sedikit banyak menjawab dan menginstruksikan pemerintah dalam hal ini harus secara serius menangani pemberdayaan masyarakat desa hutan.

Cheema dan Rondinelli dalam Hidayat (2017) mengatakan “*outline three forms of decentralization, that act as a way for transferring authority, responsibility, and resources—through deconcentration, delegation, or devolution—from the center to lower levels of administrations.*” Dalam hal ini pelaksanaan Program PHBM merupakan bagian dari pembagian kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Perum Perhutani melalui Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1972 Tentang Peleburan Perusahaan Umum Kehutanan Negara Menjadi Perum Perhutani, yang kemudian disempurnakan kembali berurut-turut melalui Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1978, Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1986, Peraturan Pemerintah No.30 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2010.

Perum Perhutani sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola hutan di pulau Jawa dan Madura yang memiliki peran dalam mendukung sistem kelestarian lingkungan, sosial budaya dan perekonomian masyarakat perhutanan nasional. Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, tentu banyak kebijakan maupun program yang telah Perum Perhutani lakukan,

program-program tersebut diantaranya adalah program prosperity (1972-1982), program pembangunan desa hutan di wilayah hutan konsesi (1982-1986), program perhutanan desa terpadu (1995-1999), program social forestry (2003), dan program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) (2001 hingga sekarang).

Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) adalah salah satu program dari Perum Perhutani yang masih berjalan hingga sekarang. PHBM adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau Perum Perhutani dengan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional (Pedoman PHBM 2009). Tujuan dari pelaksanaan program PHBM itu sendiri diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tanggung jawab Perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
- b. Meningkatkan peran Perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
- c. Memperluas akses masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
- d. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
- e. Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat desa hutan mandiri yang mendukung terciptanya hutan lestari.

(Sumber: Pedoman PHBM 2009)

Program PHBM dibentuk oleh Perum Perhutani melalui SK Dewan Pengawas Perum Perhutani No.136/KPTS/DIR/2001 tentang pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM). Setelah kemudian beberapa

tahun berjalan, SK tersebut kembali disempurnakan berturut-turut melalui SK Direksi Perum Perhutani No.268/KPTS/DIR/2007 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) Plus, dan yang paling baru adalah SK Direksi Perum Perhutani No.682/KPTS/DIR/2009 tentang pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM).

Dalam pelaksanaan PHBM Perum Perhutani bekerjasama dengan masyarakat desa hutan melalui pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH adalah lembaga resmi berbadan hukum yang memiliki AD/ART serta merepresentasikan masyarakat desa hutan yang mana secara administratif melakukan kerjasama kemitraan dengan Perum Perhutani dalam aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan. Anggota LMDH pada umumnya merupakan para petani penggarap yang sebelumnya tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) dan anggota masyarakat lain yang peduli terhadap keberadaan dan kelestarian hutan. Dengan adanya LMDH diharapkan terjadi pola komunikasi yang partisipatif antara masyarakat dengan Perum Perhutani maupun para pihak lainnya yang terkait dalam penerapan program. Kelestarian hutan yang pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan akan membawa kemakmuran bagi masyarakat hutan. Disisi lain, masyarakat hutan yang sejahtera akan memiliki kemandirian dalam ekonomi dan secara bertahap juga akan mendukung kelestarian hutan itu sendiri.

Berbicara mengenai program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM), Jember merupakan salah satu daerah yang ikut melaksanakan program tersebut dibawah Perum Perhutani KPH Jember. Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Jember memiliki luas kawasan hutan sejumlah 61.525,14 Ha yang terdiri dari kawasan hutan produksi seluas 22.292,33 Ha (31%), hutan lindung seluas 29,504,4 Ha (55%), hutan kawasan perlindungan seluas 7.655,66 Ha (11%), dan kawasan penggunaan lain seluas 2.072,75 Ha (3%) (Perum Perhutani KPH Jember). Dengan luas demikian itu, banyak permasalahan yang dihadapi oleh KPH Jember. Salah satu yang menonjol adalah kegiatan pembalakan liar. Tercatat dalam berita yang dilansir oleh AntaraNews pada

tanggal 30 Desember tahun 2017 total kerugian negara akibat pembalakan liar di kawasan Perum Perhutani KPH Jember mencapai Rp 1,3 miliar.

Menurut Administratur Perum Perhutani KPH Jember Karuniawan Purwanto Sanjaya dalam berita yang dilansir oleh AntaraNews pada tanggal 30 Desember tahun 2017 lalu, “lokasi pembalakan liar tertinggi di Kabupaten Jember berada di kawasan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sabrang dan Curahtakir yang berada di kawasan Balai Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Ambulu. Pembalakan liar yang terjadi di BKPH Ambulu mencakup areal seluas 13.053 hektare. 63 kasus dari total 80 kasus pembalakan liar di KPH Jember telah tercatat terjadi di BKPH Ambulu dengan kerugian negara ditaksir senilai Rp 1,25 miliar. Tindakan tegas sebenarnya sudah dilakukan, salah satu kasus diantaranya adalah penangkapan satu buah truk berisi kayu jati curian milik BKPH Ambulu dari petak 19 Wilayah Sabrang, Dusun Ungkalan, Kecamatan Ambulu yang terjadi pada 11 Januari tahun 2016 lalu”.

Berdasarkan berita yang dilansir oleh PojokPitu tertanggal 11 Januari tahun 2016 tersebut dijelaskan bahwa “Perhutani BKPH, bagian kesatuan pemangku hutan wilayah ambulu, kecamatan Ambulu Jember, pada hari itu mengamankan satu truk penuh kayu bermuatan yang diduga hasil *illegal logging* di hutan Sabrang. Meskipun berhasil menangkap hampir sepuluh kubik kayu namun pihak perhutani gagal menangkap pelaku yang sudah paham wilayah hutan tersebut. Truk ber nopol AD 1434 SF, diduga sengaja ditinggal oleh para pelaku saat akan dilakukan penggerebekan di wilayah hutan Sabrang, petak 19. Aksi penebangan liar atau *illegal logging* ini masih marak diwilayah ambulu, karena disamping faktor ekonomi juga faktor kebutuhan kayu sangat tinggi”.

Berdasarkan gambaran persoalan pembalakan liar tersebut menjadi bukti bahwa kesadaran masyarakat Sabrang untuk menjaga kelestarian hutan masih sangat minim. Padahal keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan salah satu unsur penting untuk mewujudkan hutan yang lestari. Hubungan ini tentunya harus disertai kesepakatan-kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi bisa mengakomodir semua kepentingan baik itu pemerintah, pengelola maupun masyarakat desa hutan.

Program PHBM di Desa Sabrang sebenarnya telah berjalan selama kurang lebih 11 tahun. Pelaksanaan PHBM di Desa Sabrang diwujudkan melalui pembentukan LMDH Harapan Makmur, berdasarkan akta notaris nomor 68 tanggal 29 Agustus tahun 2006, untuk kemudian dibuat sebuah perjanjian kerjasama dengan Perum Perhutani sebagai landasan kerja pengelolaan sumberdaya hutan di Desa Sabrang. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam kerja sama pengelolaan hutan antara Perum Perhutani dan LMDH Harapan Makmur diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penanaman pohon inti (tanaman pokok)
- b. Melakukan pemeliharaan
- c. Melakukan pemanenan
- d. Melakukan pengamanan hutan
- e. Penggunaan lahan sebagai lahan pertanian (tumpang sari)

Dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas, telah banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Harun Al-Rasyid selaku ketua LMDH Harapan Makmur menuturkan:

“Sebetulnya masyarakat dalam kesejahteraan meningkat, ada peningkatan, dan masyarakat yang di hutan dengan yang di desa yang sama sama tidak punya modal lebih enak yang di hutan. Masalahnya apa, kan tidak ada kategori katakan nyewa beli kan disitu, kalau di lahan sawah kita kan harus menyewa dan sebagainya, terus dalam PHBM kan tidak ada jangka waktunya, selama bisa dipakek di bawah tegakan bisa ditanami ya ditanami terus, mangkanya lebih sejahtera.” (6 Juli 2018)

Kendati demikian, pelaksanaan program PHBM di Desa Sabrang masih dirasa kurang maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih tingginya tingkat pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sabrang. Harun Al-Rasyid kembali menerangkan bahwa :

”Kualitas hutan makin tahun makin menurun, jadi ketika saya sudah di PHBM sampai sekarang menurun, karena juga faktor manusianya yang tidak menjaga lingkungan hutan itu sendiri sehingga hanya untuk

kepentingan dirinya, kan fungsi hutan ada ekologi, sosial dan ekonomi, adanya mengandalkan ekonominya yang banyak masyarakat, dia tidak berpikir masalah ekologinya yang menyangkut itu sebenarnya lebih besar dan ini yang sulit, sehingga harus ada ketegasan”. (6 Juli 2018)

Berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No:682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, keberhasilan PHBM diukur dampaknya terhadap :

- a. Perbaikan biofisik lingkungan berupa keberhasilan reboisasi, perbaikan fungsi lingkungan, dan penurunan gangguan keamanan hutan selama 5 (lima) tahun terakhir.
- b. Aspek sosial berupa peningkatan pendidikan, kesehatan, jejaring kelembagaan, dan tingkat keharmonisan antara petugas Perum Perhutani dengan masyarakat.
- c. Aspek ekonomi berupa peningkatan usaha produktif dan daya beli masyarakat.

Dari data tersebut, ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan PHBM. Penelitian Hamid, Zulkarnaen dan Saam (2011) menunjukkan bahwa interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan karena keberadaan masyarakat sekitar hutan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberadaan hutan itu sendiri. intensitas interaksi yang berlangsung baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan sangat berpengaruh terhadap keberadaan kelangsungan suatu kawasan hutan, hal tersebut karena sebagian besar aspek penyokong kehidupan diperoleh dan berasal dari hutan, oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat di sekitar hutan. Neumann dan Hirsch (2000) juga menyebutkan bahwa prinsip yang penting bahwa cara terbaik menjaga hutan tropis dan keanekaragaman hayatinya adalah dengan membuat relevansi ekonomi terhadap masyarakat sekitarnya.

Dari berbagai macam persoalan yang telah digambarkan diatas menjadi bekal bagi penulis dalam menggali informasi yang lebih dalam. peneliti bermaksud menggali dampak lain terkait aspek ekonomi pelaksanaan program PHBM. PHBM yang telah berjalan semenjak tahun 2006 seharusnya memberikan dampak bagi masyarakat, dalam hal ini peneliti fokus pada aspek ekonomi yang akan digali dampaknya mengingat sektor ekonomi adalah sektor kunci yang dalam banyak kasus menjadi alasan utama bagi masyarakat hutan untuk bertindak. Oleh karena itu, kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam tentang “Dampak Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Perkonomian Masyarakat Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember (Studi Kasus Lembaga Masyarakat Desa Hutan Harapan Makmur).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian menurut Idrus (2009) merupakan serangkaian pertanyaan yang dijadikan dasar pijakan bagi peneliti untuk menentukan berbagai desain dan strategi penelitiannya. Menurut Idrus, dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah dikenal dengan istilah fokus penelitian, dari fokus inilah kemudian peneliti menurunkan pertanyaan penelitian yang ingin ditelitinya. Berkaitan dengan fokus dan berlandaskan kepada judul penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan fokus penelitiannya kepada;

“Bagaimana dampak program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) terhadap perkonomian masyarakat desa Sabrang”?

Rumusan masalah tersebut akan membantu peneliti dalam mencari jawaban ketika melakukan penelitian di lapangan. Hal tersebut seperti pernyataan Sugiyono (2012) bahwa rumusan masalah merupakan salah satu pelayanan yang akan diberikan jawabannya melalui pengumpulan data.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian merupakan capaian atau target yang ingin dicapai dalam penelitian. Aziz (2013) menjelaskan bahwa dalam kegiatan penelitian, tujuan harus dinyatakan dengan tegas, jelas dan eksplisit. Tujuan ditentukan untuk memberi penegasan tentang batas perjalanan yang hendak dicapai dalam seluruh kegiatan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari peneliti yaitu untuk mendeskripsikan serta menganalisis dampak program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) terhadap perekonomian masyarakat di Desa Sabrang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan gambaran kegunaan suatu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a) Bagi dunia akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi negara, baik bersifat teoritis maupun praktis.

b) Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah terkait dampak ekonomi pelaksanaan program PHBM khususnya di Kabupaten Jember

c) Bagi masyarakat luas

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat, terlebih lagi berkaitan dengan program-program pemerintah untuk urusan kehutanan. Diharapkan nantinya muncul tanggapan positif maupun negatif sehingga dapat menggerakkan masyarakat menuju pola pikir yang lebih sehat.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus mempunyai konsep dasar berupa teori yang akan digunakannya sebagai bahan dalam mengkaji fenomena sosial yang kemudian dapat dijadikan sebagai landasan berpikir dalam melakukan penelitian. Landasan berpikir ini kemudian dapat menjadi dasar bagi seorang peneliti dalam mengupas sebuah permasalahan penelitian untuk dicari jawabannya. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model deduksi dalam penggunaan teori. Karena dirasa penting bagi peneliti dalam berbagai tahap pengumpulan data nantinya untuk tetap memiliki jalur yang jelas dalam proses penelitian. Sehingga pada pembahasan penelitian peneliti memiliki banyak pilihan dengan membandingkan teori tersebut, baik dalam konteks menerima, mendukung, mengkritik, bahkan untuk menolak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep yang dirasa dapat mewakili rumusan masalah yang hendak dijawab, sebagai berikut:

- a. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik
- b. Konsep Evaluasi Kebijakan
- c. Konsep Dampak Kebijakan
- d. Konsep Ekonomi Masyarakat Hutan
- e. Program PHBM
- f. Indikator Keberhasilan Program

Keenam konsep dasar tersebut diharapkan mampu membentuk kerangka berfikir peneliti yang kemudian dapat mempermudah peneliti untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

### **2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik**

#### **2.1.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik idealnya menjadi sebuah pencerah bagi masyarakat yang sedang dihadapkan pada suatu permasalahan. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah melalui program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat

(PHBM) di implementasikan dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat sekitar hutan, tentu kebijakan ini seharusnya menjadi salah satu instrument bagi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan mengenai tata kelola hutan yang lebih baik.

Pengertian kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya. Selanjutnya Titmuss dalam Suharto (2005) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Menurut Titmuss kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah dan berorientasi kepada tindakan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip yang mengarahkan kepada cara bertindak yang terencana dan konsisten dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam setiap kebijakan publik, akan selalu diawali oleh perumusan masalah. Hal ini ditujukan agar segala permasalahan dapat diidentifikasi untuk kemudian ditemukan sebuah kebijakan yang mampu mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, suatu kebijakan publik mempunyai hubungan yang erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Menurut Islamy (2002) bahwa dalam sebuah konsep demokrasi modern, kebijaksanaan negara tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (*public opinion*) pasti juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (*tercermin*) dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Hal ini berarti pejabat publik yang berwenang menyusun dan merumuskan kebijaksanaan yang menyangkut publik harus mendengar pendapat dan saran dari masyarakat serta mendasarkan keputusannya pada kepentingan umum, agar kebijakan tersebut dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan. Lebih lanjut Islamy (2002) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

- a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa tindakan-tindakan pemerintah;
- b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan sebagai wacana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- c. Bahwa kebijakan publik itu baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan tujuan tertentu;
- d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Selanjutnya mengenai peran otoritas pemerintah, Easton dalam Thoha (2008) mengartikan kebijakan negara sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Dalam pandangan Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, berarti pemerintah telah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek sosial yang ada dalam masyarakat. Suatu kebijakan publik akan mudah di implementasikan apabila mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktek serta hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam program PHBM, nilai-nilai yang sedang dialokasikan oleh pemerintah adalah prinsip pemanfaatan hutan yang berkelanjutan. Hal ini ditujukan agar masyarakat sadar untuk menjaga kelestarian hutan.

Studi kebijakan publik mencakup pada penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Hoogerwerf (1983) berpendapat bahwa pengertian kebijakan publik pada hakekatnya adalah semacam jawaban suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan tindakan yang terarah. Anderson (1990) memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintahan) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Kebijakan publik kemudian, dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam menggunakan kewenangan dan menjalankan

kewajibannya untuk kepentingan masyarakat. Tentunya segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut akan memiliki berbagai dampak, dan oleh karenanya perlu pertimbangan-pertimbangan strategis untuk dipikirkan guna kepentingan masyarakat luas.

### 2.1.2 Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik

Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangn-undangan sebagai berikut.

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. TAP MPR
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

### 2.1.3 Jenis Kebijakan Publik

Terdapat beberapa jenis kebijakan sesuai dengan masing masing sasaran atau apa yang akan diselesaikan dengan adanya kebijakan tersebut. Anderson (1990) dalam bukunya *Public Policymaking* membagi jenis kebijakan menjadi lima, yaitu:

- a. *Contituent*

Kebijakan *contituent* adalah jenis kebijakan yang membuktikan keberadaan negara, termasuk di dalamnya kebijakan keamanan dalam negara.

- b. *Distributive*

Kebijakan *distributive* adalah kebijakan yang berkenaan dengan alokasi pelayanan atau manfaat untuk segmen atau kelompok masyarakat tertentu dari suatu populasi.

- c. *Regulatory*

Kebijakan *regulatory* adalah kebijakan yang memaksa batasan atau larangan

perilaku tertentu bagi individu ataupun kelompok. Kebijakan *regulatory* biasanya digunakan untuk mengatasi konflik yang terjadi di antara kelompok.

d. *Self Regulatory*

Kebijakan *self regulatory* sama halnya dengan kebijakan *regulatory*, hanya saja kebijakan dirumuskan oleh para pelakunya, misalnya kebijakan tentang praktek dokter profesional atau praktek akuntan bagi mereka yang mempunyai sertifikasi akuntan profesional.

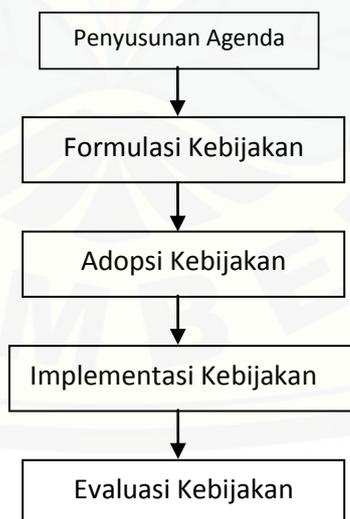
e. *Redistributive*

Kebijakan *redistributive* berkenaan dengan upaya pemerintah untuk memberikan pemindahan alokasi kesejahteraan, kekayaan, atau hak-hak dari kelompok tertentu di masyarakat.

#### 2.1.4 Tahapan Proses Kebijakan Publik

Beberapa tahapan dari proses pembuatan kebijakan publik Dunn (2000) dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik dikelompokkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik



Langkah pertama yang dilakukan oleh seorang pembuat kebijakan adalah merumuskan masalah dan menempatkannya dalam agenda kebijakan. Kemudian masalah-masalah yang telah diidentifikasi dan dicari solusinya disusun dalam

bentuk formulasi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan (dalam adopsi kebijakan) dipilih sebuah pilihan terbaik, untuk kemudian diimplementasikan. Setelah implementasi dilakukan, dilakukan penilaian terhadap kinerja implementasi sebagai bentuk evaluasi sejauh mana kebijakan publik yang telah dibuat berhasil memecahkan masalah di masyarakat.

## 2.2 Konsep Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (2000) evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. Salah satu kriteria yang digunakan pada penilaian dalam evaluasi adalah hasil (*outcomes*) yaitu apakah terjadi perubahan indikator-indikator utama tujuan program (membaik atau tidak), berapa banyak perubahannya, serta apakah perubahan tersebut disebabkan oleh program.

### 2.2.1 Pendekatan dalam Evaluasi

Evaluasi menurut Dunn berdasarkan pendekatannya dibagi menjadi 3 yaitu :

#### a. Evaluasi Semu

Evaluasi Semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial.

#### b. Evaluasi Formal

Evaluasi Formal adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat

kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk nilai dan kebijakan program. Dalam evaluasi formal dikenal dua tipe evaluasi yakni evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. *Evaluasi sumatif* meliputi usaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Sebaliknya, *evaluasi formatif* meliputi usaha-usaha untuk secara terus menerus memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target formal.

c. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi Keputusan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan di satu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan. Ini berarti bahwa tujuan dan target dari para pembuat kebijakan dan administrator merupakan salah satu sumber nilai, karena semua pihak yang mempunyai andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target dimana kinerja nantinya diukur.

### 2.3 Dampak Kebijakan

Dampak adalah suatu akibat yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kebijakan atau program. Dampak dari sebuah kebijakan atau program terdapat pada bagian evaluasi yang menempati posisi terakhir dalam alur proses kebijakan publik. Dampak, berbeda dengan hasil keluaran kebijakan (*output*). *Output* kebijakan merupakan produk, *direct service* atau sumberdaya yang dirasakan langsung oleh kelompok sasaran. Dunn (2000) mengatakan, *impact* (dampak) kebijakan merupakan perubahan nyata yang terjadi pada tingkah laku atau sikap

kelompok sasaran yang direncanakan dapat dirubah melalui *output* kebijakan tersebut. Dye (1975) mengungkapkan mengenai 5 dimensi dampak yang dijelaskan oleh Budi Winarno dalam bukunya “Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus” pada tahun 2005 sebagai berikut:

- a. *The impact intarget situations or grups*, yaitu dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
- b. *The impact on situations or grups other than target*, kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan.
- c. *Its Impact on future ask well ask immediate conditions*, kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang.
- d. *Its direct cost, in term of resources devote to program*, biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
- e. *Its in direct cost, including loss of opportunities to do other things*, menyangkut biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Dampak kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program, yaitu dari kondisi awal yang tidak dikehendaki menuju kondisi baru yang lebih dikehendaki. Hasil kebijakan ini jika dirunut merupakan konsekuensi lanjutan atas keluaran kebijakan yang diterima oleh kelompok sasaran (Purwanto dan Sulistyastuti 2015). Pada studi evaluasi menurut Finsterbusch dan Mozt yang dikutip dalam Subarsono (2005) terdapat empat jenis metode evaluasi yang digunakan untuk menilai dampak, yaitu:

- a. *Single program after only*, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi kelompok sasaran setelah program diimplementasikan.

- b. *Single program before after*, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran dengan membandingkan kondisi kelompok sasaran sebelum dan setelah program diimplementasikan.
- c. *Comparative after only*, mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran setelah implementasi dan membandingkannya dengan kondisi kelompok kontrol.
- d. *Comparative before after*, yaitu menunjuk bahwa evaluasi kebijakan dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran dengan kelompok kontrol sebelum dan sesudah implementasi.

Dalam penelitian ini peneliti melihat dampak menggunakan 5 dimensi dampak yang disampaikan oleh Thomas R. Dye, hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mendeskripsikan masalah nantinya. Dalam penelitian ini juga akan digunakan jenis metode evaluasi *single program before after* untuk mengukur dampak program. Metode evaluasi ini dipilih karena rentang waktu yang mampu untuk dijangkau oleh peneliti, serta bobot informasi yang dirasa cukup dalam menggali informasi di lapangan nantinya. Dampak diukur sebagai bagian dari proses evaluasi suatu program. Harapannya kebijakan lanjutan berkaitan dengan isu dan masalah yang lebih sempurna pelaksanaannya.

#### **2.4 Ekonomi Masyarakat Hutan**

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan. Jika pengertian hutan ditinjau dari sudut pandang sumberdaya ekonomi terdapat sekaligus tiga sumberdaya ekonomi yaitu: lahan, vegetasi bersama semua komponen hayatinya serta lingkungan itu sendiri sebagai sumberdaya ekonomi yang pada akhir-akhir ini tidak dapat diabaikan. Sedangkan kehutanan diartikan sebagai segala pengurusan yang berkaitan dengan hutan, mengandung sumberdaya ekonomi yang beragam dan sangat luas pula dari kegiatan-kegiatan yang bersifat biologis seperti rangkain proses silvikultur sampai dengan berbagai kegiatan administrasi pengurusan hutan. Hal ini berarti kehutanan sendiri merupakan sumberdaya yang

mampu menciptakan sederetan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat (Wirakusumah, 2003).

Hasil hutan juga jelas merupakan sumberdaya ekonomi potensial yang beragam yang didalam areal kawasan hutan mampu menghasilkan hasil hutan kayu, non kayu dan hasil hutan tidak kentara (*intangible*) seperti perlindungan tanah, pelestarian sumberdaya air dan beragam hasil wisata. Uraian tersebut di atas terungkap bahwa hutan, kehutanan dan hasil hutan sesungguhnya menjadi sumberdaya (*resources*) yang mempunyai potensi menciptakan barang, jasa serta aktifitas ekonomi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya, dalam pengelolaan sumberdaya hutan, tidak lepas tentunya dari masyarakat yang tinggal disekitar hutan.

## **2.5 Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat**

Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai kelanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Pengelolaan sumberdaya hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan, dan kawasan hutan, serta perlindungan sumberdaya hutan dan konservasi alam (Pedoman PHBM, 2009).

PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional. PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan. Masyarakat desa hutan dalam model kemitraan diwakili oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dengan sistem PHBM.

LMDH merupakan lembaga yang berbadan hukum, mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani dalam PHBM dengan prinsip kemitraan. LMDH memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa dimana LMDH itu berada, bekerjasama dengan Perum Perhutani dan mendapat bagi hasil dari kerjasama tersebut. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan hutan, LMDH mempunyai aturan main yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Program PHBM dibentuk oleh Perum Perhutani melalui SK Dewan Pengawas Perum Perhutani No.136/KPTS/DIR/2001 tentang pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM). Setelah kemudian beberapa tahun berjalan, SK tersebut kembali disempurnakan berturut-turut melalui SK Direksi Perum Perhutani No.268/KPTS/DIR/2007 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) Plus, dan yang paling baru adalah SK Direksi Perum Perhutani No.682/KPTS/DIR/2009 tentang pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM).

Pelaksanaan PHBM di bidang pengelolaan hutan, meliputi program-program sebagai berikut :

a. Bidang Perencanaan

- 1) Penyusunan Perencanaan Petak Hutan Pangkuan secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak terkait. Perencanaan meliputi: rencana kelola wilayah hutan, rencana sosial, rencana kelembagaan, peningkatan sumberdaya manusia, peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan.
- 2) Perencanaan disusun oleh LMDH, Perum Perhutani dan para pihak yang berkepentingan dengan pendekatan desa melalui kajian sumberdaya yang ada di masing-masing desa.

b. Bidang Pembinaan Sumberdaya Hutan

- 1) Persemaian, tanaman dan pemeliharaan dikerjasamakan dengan LMDH.

- 2) Pengkaderan mandor sebagai penyuluh PHBM PLUS.
  - 3) Pembuatan pusat informasi dan komunikasi PHBM.
  - 4) Pelatihan-pelatihan usaha produktif dan kewirausahaan untuk LMDH.
  - 5) Pemberdayaan terhadap LMDH bersama dengan para pihak.
  - 6) Mengaktifkan pola FGD (*Foccus Group Discussion* = Diskusi Kelompok Terarah).
  - 7) Pembentukan *site learning* (lokasi pembelajaran) untuk PHBM.
- c. Bidang Produksi
- 1) Alokasi bagi hasil untuk produksi kayu dan non-kayu, wisata, galian C, sampah, air, dll.
  - 2) Partisipasi LMDH dalam pengamanan hasil tebang dan pengangkutan kayu dari hutan ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK).
- d. Bidang Pemasaran dan Industri
- 1) Pembentukan warung kayu untuk mempermudah masyarakat desa hutan dalam memperoleh kayu.
  - 2) Membantu pasokan kayu untuk industri kecil yang dimiliki oleh LMDH.
  - 3) Membantu teknologi bagi industri LMDH.
  - 4) Membantu pengembangan pemasaran bagi industri LMDH.
- e. Bidang Keamanan
- 1) LMDH berperan aktif dalam menjaga keamanan hutan.
  - 2) LMDH bersama Perhutani melaksanakan patroli harian untuk mengatasi keamanan dan pengamanan hutan.
- f. Bidang Keuangan
- 1) Biaya PHBM PLUS minimal 10 % dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
  - 2) Pendapatan perusahaan dari bagi hasil kegiatan PHBM di luar usaha pokok dikembalikan untuk mendukung kegiatan PHBM PLUS.
  - 3) Memfasilitasi LMDH dalam memperoleh sumber modal dari pihak ketiga.
  - 4) Memberikan bimbingan kepada LMDH dalam pengelolaan administrasi dan pemanfaatan keuangan.

g. Bidang Sumberdaya Manusia (Perhutani)

- 1) Penyiapan petugas PHBM yang proporsional dengan kualitas yang memadai.
- 2) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat Pusat, Unit dan KPH dengan melakukan pertemuan dan aktifitas yang intensif.
- 3) Pembangunan dan pengembangan *training centre* (pusat pelatihan) PHBM untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan metode partisipatif yang berbasis *community development* (pembangunan masyarakat).

## 2.6 Indikator Keberhasilan Program

Alat bantu yang dapat dipakai oleh seorang peneliti untuk dapat menilai baik atau buruknya kinerja implementasi suatu kebijakan disebut sebagai indikator. Jika dikaitkan dengan kebijakan publik, indikator merupakan instrument penting untuk mengevaluasi kinerja implementasi suatu kebijakan. Dengan adanya indikator maka peneliti dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, program, atau proyek (Purwanto dan Sulistyastuti 2015).

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Dalam program PHBM terdapat tiga indikator keberhasilan. Berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No:682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, keberhasilan PHBM diukur dampaknya terhadap :

- a. Perbaikan biofisik lingkungan berupa keberhasilan reboisasi, perbaikan fungsi lingkungan, dan penurunan gangguan keamanan hutan selama 5 (lima) tahun terakhir.

- b. Aspek sosial berupa peningkatan pendidikan, kesehatan, jejaring kelembagaan, dan tingkat keharmonisan antara petugas Perum Perhutani dengan masyarakat.
- c. Aspek ekonomi berupa peningkatan usaha produktif dan daya beli masyarakat.

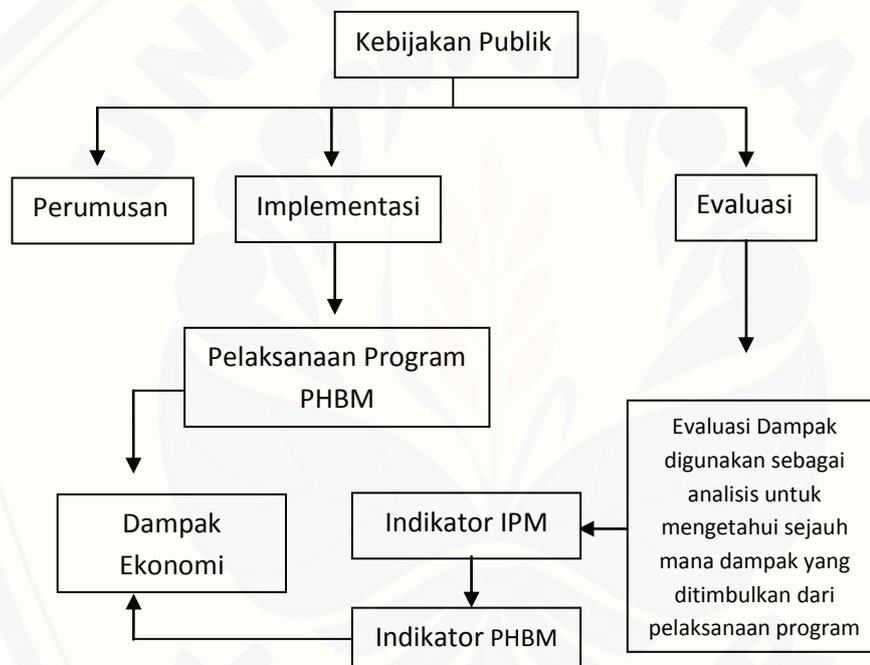
Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antarwilayah atau antarnegara. Oleh karena itu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan *output* dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak (Sumodiningrat 2009).

Dalam penelitian ini dipilih aspek ekonomi sebagai fokus utama penelitian. Kemampuan daya beli seperti yang dijelaskan diatas merupakan bagian dari indikator IPM yang mana mengukur dimensi hidup layak. Indikator keberhasilan peningkatan usaha produktif dan daya beli masyarakat pada aspek ekonomi dalam program PHBM merupakan pengejawantahan indikator kemampuan daya beli dalam IPM. Hal ini dapat ditegaskan pula dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor:268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus Pasal 1 Ayat 20 yang mengatakan bahwa:

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah meliputi peningkatan daya beli, pendidikan dan kesehatan yang dapat diukur dengan Indeks Pembangunan manusia (IPM)”

Bersesuaian dengan hal tersebut, maka peneliti menggunakan peningkatan usaha produktif dan daya beli masyarakat sebagai indikator dalam menilai keberhasilan atau kegagalan program PHBM yang telah dilaksanakan oleh LMDH Harapan Makmur dan Perum Perhutani di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Penelitian



### **BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2011) Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu, metode penelitian merupakan sebuah alat yang mutlak diperlukan dalam proses pencarian atas kebenaran sebuah ilmu pengetahuan. sebagai sebuah alat pencarian kebenaran, penggunaan suatu metode dalam penelitian hendaknya memperhatikan kesesuaian terhadap fenomena yang diteliti. Karena hasil dari sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam bab metode penelitian ini, akan dijelaskan mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian dan beberapa hal lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian sebagai salah satu metode penelitian kemudian berguna bagi peneliti untuk memberi pilihan dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan gejala atau fenomena sosial yang berkaitan dengan dampak pelaksanaan program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat secara natural. Karena menurut Norman dan Yvonna (2009), kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur (jika memang diukur) dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau

frekuensinya. Hal ini berarti dalam penelitian kualitatif lebih menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subyek yang diteliti, dan dinamika situasilah yang kemudian membentuk penyelidikan. Norman dan Yvonna (2009) juga menambahkan:

“para peneliti kualitatif mementingkan sifat penyelidikan yang sarat nilai. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya. Sebaliknya, penelitian kuantitatif menitik beratkan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab-akibat antara bermacam-macam variabel, bukan prosesnya. Penyelidikan dipandang berada dalam kerangka bebas nilai.”

Metode kualitatif mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang lebih mengutamakan penghayatan, sehingga berusaha memahami dan menginterpretasi makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti itu sendiri.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan faktor penting dalam penentuan batas ruang lingkup penelitian. Menurut Sugiyono (2011) yang disebut fokus adalah pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2014) bahwa penentuan fokus suatu penelitian kualitatif memiliki dua tujuan, pertama batas penentuan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus. Kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antar peneliti dan fokus. Dengan adanya fokus, maka peneliti akan dapat membuat keputusan lebih mudah dalam pencarian data, sehingga dapat diketahui mana data yang diperlukan dalam penelitian dan mana yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, kemudian peneliti dalam penelitian ini menetapkan fokus penelitian pada dampak ekonomi program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

### 3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian atau yang dalam buku Analisis Data Penelitian Kualitatif Burhan Bungin (2011) disebut sebagai setting penelitian adalah tentang latar alamiah (tempat, lokasi, atau di mana) penelitian itu dilakukan. Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Desa Sabrang dipilih karena telah dipetakan oleh Perum Perhutani sebagai daerah dengan perambahan dan pencurian kayu tertinggi di Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Jember. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut peneliti bermaksud untuk menggali dampak yang ditimbulkan dari program PHBM yang mana telah diterapkan semenjak tahun 2006 dan secara berkelanjutan digunakan sebagai alat pengentasan permasalahan tata kelola kehutanan di Desa Sabrang.

Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2018, yaitu pada rentang waktu antara bulan September sampai dengan Oktober. Dalam rentang waktu tersebut diharapkan peneliti mampu menggali serta mendapatkan gambaran dampak program PHBM terhadap perekonomian masyarakat Desa Sabrang.

### 3.4 Data dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, data memegang peranan penting sebagai komponen pokok yang harus terpenuhi untuk menjawab permasalahan penelitian. Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya harus ditunjang oleh data akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dalam masalah yang diteliti. Secara lebih spesifik, Bungin (2011:23) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, sebagian besar menggunakan data kualitatif yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan berupa cerita pendek. Data kualitatif bersifat subjektif, sehingga peneliti harus berusaha menghindari sikap subjektif yang dapat mengaburkan obyektifitas data penelitian (Bungin, 2011: 103). Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder berupa catatan-catatan resmi, laporan-laporan atau dokumen-dokumen serta data lainnya yang mendukung data primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perum Perhutani KPH Jember
- 2) Pemerintah Desa Sabrang
- 3) LMDH Harapan Makmur

### 3.5 Penentuan Informan Penelitian

Informan dalam metode kualitatif terus berkembang secara sesuai dengan tujuan dari peneliti sampai data yang dikumpulkan dianggap jenuh (hasil tetap). Alat pengumpul data atau *instrument* dalam metode ini adalah peneliti sendiri, oleh karena itu peneliti menjadi instrument kunci, sehingga ketika mengumpulkan data peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan membuat generalisasi dari hasil penelitiannya, namun yang terpenting adalah kedalaman informasi yang diperolehnya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel, namun menggunakan informan. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016), informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *sampling purposive*. Menurut Sugiyono (2011), dalam menentukan informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
- b. orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- c. orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektifitasnya.
- d. orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa informan terpilih dari beberapa instansi pemerintahan maupun elemen masyarakat di Kabupaten Jember.

- a. Harun Al Rasyid selaku ketua LMDH Harapan Makmur
- b. Kuseman selaku anggota LMDH Harapan Makmur
- c. Agus anggota LMDH Harapan Makmur
- d. Husen anggota LMDH Harapan Makmur
- e. Juma'ani anggota LMDH Harapan Makmur
- f. Muji anggota LMDH Harapan Makmur
- g. Wagiyo anggota LMDH Harapan Makmur
- h. Agus Sulaiman selaku Kepala Bagian Komunikasi Perum Perhutani KPH Jember
- i. Suryani selaku Kepala Bagian SDM Perum Perhutani KPH Jember
- j. Bambang selaku Kepala Bagian Danru Polhutan Perum Perhutani KPH Jember

### **3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data**

Teknik dan alat perolehan data menurut Sugiyono (2011:223) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:53) menjelaskan bahwa secara umum ada empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan

gabungan/triangulasi. Pengukuran dalam penelitian kualitatif dilakukan secara *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi peserta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*). Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan.

Teknik dan alat perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 3.6.1 Teknik Wawancara

Menurut Moleong (2014) pengertian wawancara adalah sebagai berikut:

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*in dept interview*). Melalui wawancara peneliti bisa mendapatkan informasi yang mendalam (*in depth interview*) karena peneliti dapat menjelaskan pertanyaan yang tidak dimengerti informan, peneliti dapat mengajukan pertanyaan, informan cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan, dan informan dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa silam dan masa mendatang.

Adapun jenis wawancara yang digunakan sesuai pendapat Sugiyono (2011) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis wawancara semistruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Wawancara semistruktur dilakukan dengan proses tanya jawab antara peneliti dengan informan yang berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Peneliti dalam proses wawancara semistruktur terlebih dahulu membuat pedoman wawancara yang berupa pertanyaan secara garis besar untuk diajukan kepada informan. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam proses

memperoleh data adalah alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan hasil wawancara.

### 3.6.2 Teknik Observasi

Definisi observasi menurut Nawawi (1998) observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Peneliti dalam penelitian kualitatif harus langsung terjun ke lapangan tempat penelitian. Teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif pasif. Seperti pendapat Sugiyono (2011) peneliti datang di tempat orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa peneliti hanya mengamati situasi dan mencatat kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang dianggap penting sebagai data di daerah objek penelitian tanpa melibatkan diri dalam aktifitas tersebut.

### 3.6.3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2011) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Selanjutnya teknik dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

Selanjutnya jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto. Data yang diambil dengan teknik dokumentasi dalam penelitian ini, misalnya dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengelolaan hutan di KPH Jember serta aktifitas lain yang memiliki konteks serupa.

### 3.6.4 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian begitu penting karena memberikan referensi, memberikan perbandingan-perbandingan teoritik dan memberikan standar teoritik penilaian yang akan dilakukan. Peneliti dalam penelitian ini berusaha untuk mencari buku, jurnal, skripsi, tesis atau disertasi terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pengetahuan dari studi pustaka tersebut menjadi referensi dan juga dapat digunakan sebagai komparasi data sehingga lebih menyempurnakan penjarangan data di lapangan.

### 3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian, agar sebuah penelitian yang dihasilkan oleh seorang peneliti dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah penelitian dikatakan valid apabila datanya valid. Maka dengan demikian dirasa perlu dalam penelitian untuk menggunakan teknik menguji keabsahan data sebagai salah satu metode penelitian. Moleong (2014) mengatakan tahap-tahap teknik pemeriksaan keabsahan data agar benar-benar valid dan dipercaya kebenarannya adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi dan uraian rinci, pengecekan anggota dan uraian rinci.

Tabel 3.1 Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (Derajat Kepercayaan)	1. Perpanjangan Keikutsertaan 2. Ketekunan Pengamatan 3. Triangulasi 4. Pemeriksaan Sejawat 5. Kecukupan Referensi 6. Pengecekan Anggota Dan
Kepastian	7. Uraian Rinci

Sumber: Moleong (2014: 327)

#### 3.7.1 Perpanjangan Keikutsertaan

Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen dalam penelitian itu sendiri sehingga keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data

menjadi salah satu teknik menguji keabsahan data. Seorang peneliti kualitatif relatif memerlukan waktu yang lebih panjang dalam proses keikutsertaannya untuk mengumpulkan data. Tahapan pertama dari proses menguji keabsahan data, perpanjangan keikutsertaan peneliti artinya menambah waktu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memperpanjang waktu seorang peneliti untuk tinggal di lapangan sampai mendapatkan data yang jenuh dalam penelitiannya.

Perpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu cara untuk menguji keabsahan data karena peneliti akan mampu mempelajari banyak hal di lapangan tentang suatu kehidupan objek penelitiannya, sehingga peneliti dapat menguji secara langsung informasi yang didapatkan mampu dipercaya atau tidak.

#### 3.7.2 Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan untuk mencari suatu data atau hal-hal yang sangat relevan dalam masalah penelitian yang dilakukan. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan membaca referensi-referensi dan dokumentasi yang valid. Ketekunan pengamatan adalah keajekan peneliti dan kekonsistenan peneliti dalam proses analisis data.

#### 3.7.3 Triangulasi

Menurut Irawan (2006) adalah proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Triangulasi sebagai alat dalam menghilangkan perbedaan kontruksi yang ada dalam proses pengumpulan data dalam penelitian. Triangulasi sebagai alat mengkombinasikan berbagai metode yang dipakai untuk menganalisis kejadian-kejadian dari perspektif yang berbeda. Menurut Denzin (2009) terdapat 5 tipe dasar dari teknik triangulasi sebagai berikut.

- a. Triangulasi data (*data triangulation*): menggunakan sejumlah sumber data dalam penelitian
- b. Triangulasi peneliti (*investigator triangulation*): menggunakan sejumlah peneliti atau evaluator.
- c. Triangulasi teori (*theory triangulation*): menggunakan beragam perspektif untuk menginterpretasikan sekelompok data tunggal

- d. Triangulasi metodologis (*methodological triangulation*) menggunakan beragam metode untuk mengkaji program tunggal, sedangkan yang terakhir Denzin mengategorikan yaitu triangulasi interdisipliner (*interdisciplinary triangulation*)”.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan menggunakan sejumlah sumber data dalam penelitian. Menurut Bungin (2011) proses triangulasi dilakukan terus-menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada informan. Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Materi kebenaran tidak diuji berdasarkan kebenaran alat sehingga substansi kebenaran tergantung pada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu, sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak.

### 3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data

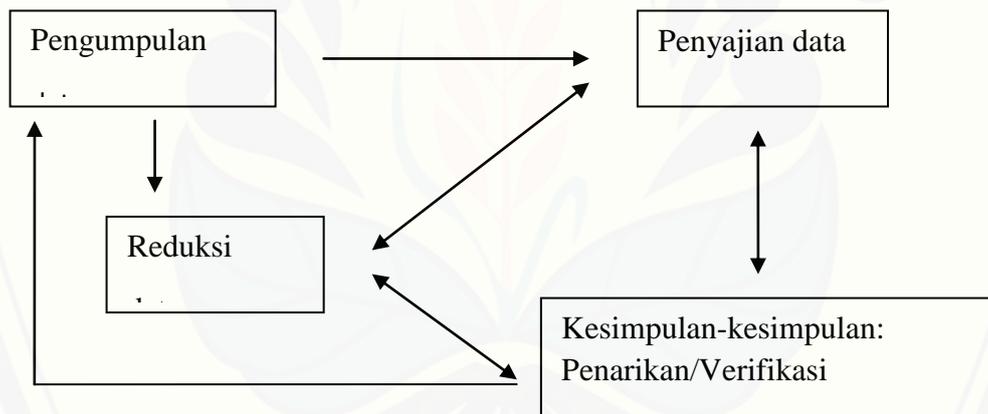
Menurut Bogdan dan Biklen dalam Irawan (2006) analisis data adalah sebagai berikut.

“Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip *interview*, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang Anda dapatkan, yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman Anda (terhadap suatu fenomena) dan membantu Anda untuk mempresentasikan penemuan Anda kepada orang lain”.

Proses analisis data dari penjelasan diatas terkait erat dengan pengumpulan dan interpretasi data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif. Peneliti membangun kesimpulan penelitiannya dengan cara mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkannya dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat di dalam

data-data tersebut. Oleh karena itu analisis data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menunggu sampai seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis itu dilaksanakan secara paralel pada saat pengumpulan data, dan dianggap selesai manakala peneliti merasa telah mencapai suatu titik jenuh dan telah menemukan pola aturan yang dicari. Maka tidak heran kalau dalam penelitian kualitatif dapat berlangsung sampai berbulan-bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun.

Peneliti dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2007). Metode analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berikut adalah gambar model analisis interaktif Miles dan Huberman.



Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman melalui empat tahapan seperti gambar di atas sebagai berikut.

### 3.8.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data di lapang dengan menggunakan teknik-teknik

pengumpulan data yang sudah ditentukan. Data yang diperoleh oleh peneliti selanjutnya dituangkan dalam laporan yang lengkap dan terperinci.

### 3.8.2 Reduksi Data

Banyaknya data yang diperoleh dari lapangan mulai dari awal penelitian, saat penelitian harus dicatat secara teliti dan rinci. Semakin banyak data yang diperoleh maka akan semakin kompleks dan rumit. Peneliti perlu melakukan reduksi data, menurut Miles dan Huberman (1992) reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya saat diperlukan. Reduksi data berarti merangkum, menggolongkan dan mengambil data-data inti atau data pokok yang dianggap penting, membuang yang tidak perlu hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

### 3.8.3 Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah mendisplay data (menyajikan data). Menurut Sugiyono (2011) dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk demikian dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dalam penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1992) penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk *teks naratif*.

### 3.8.4 Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi secara terus-menerus yaitu sejak awal peneliti memasuki lokasi dan selama proses pengumpulan data, selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan.

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

- a. Dari pelaksanaan program PHBM di Desa Sabrang masyarakat memperoleh banyak manfaat seperti bertambahnya lapangan pekerjaan, meningkatnya produktifitas, meningkatnya pendapatan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
- b. Hadirnya PHBM memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan seperti : ikan, tanaman obat, rebung, pokok hingga rumput untuk pakan ternak.
- c. Bentuk kerjasama dalam pelaksanaan program PHBM antara pihak Perhutani dan Masyarakat yang diwakili oleh LMDH sedikit banyak mampu memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk mengelola hutan yang lestari. Hal ini dapat dilihat dari penurunan tingkat pencurian kayu dan perambahan hutan di Sabrang.
- d. Masih ada banyak kekurangan yang terjadi dari pelaksanaan PHBM di Desa Sabrang contohnya :
  - 1) manajemen keuangan baik itu dari pihak Perhutani maupun LMDH yang kurang transparan.
  - 2) Banyak perjanjian-perjanjian dalam PKS yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
  - 3) Perhutani dan LMDH cenderung melakukan pembiaran kepada masyarakat yang melakukan tindakan kriminal di dalam hutan.

Semenjak tahun 2006 Perum Perhutani KPH Jember telah menjalin kerjasama dengan LMDH Harapan Makmur melalui program PHBM. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya program PHBM di Desa Sabrang telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Namun kendati demikian, masih banyak kekurangan yang harus

dijadikan bahan evaluasi seperti masih adanya praktik bagi program-program sejenis kedepan. Isu-isu mengenai kehutanan dan tanah akan selalu mengemuka karena tanah adalah bagian yang paling penting bagi masyarakat untuk hidup. Pembagian hak atas penguasaan tanah tidak akan pernah lepas dari kebijakan negara di masa yang akan datang. Kejadian di Desa Sabrang diharapkan mampu menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah maupun kalangan akademis untuk melakukan perubahan yang lebih berarti.

## 5.2 Saran

- a. Sebenarnya masyarakat sudah merasakan manfaat dari hutan dengan adanya program PHBM, namun minimnya transparansi membikin masyarakat kehilangan kepercayaan kepada Perhutani dan LMDH. Oleh karena itu, sebaiknya segera lakukan transparansi baik itu dalam manajemen keuangan maupun struktur kelembagaan melalui evaluasi bersama yang terbuka.
- b. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku. Pembiaran terhadap oknum-oknum yang tidak sejalan dengan aturan yang ada akan menciptakan budaya baru yang menjadi konsensus bersama. Perjanjian Kerja Sama yang telah lama dilanggar seperti pembagian dana bagi hasil lahan Perhutani, serta pembagian dana *sharing* harus dievaluasi kembali.
- c. Mengevaluasi program PHBM utamanya dengan melibatkan masyarakat. Kerja-kerja pelaksanaan program kehutanan jika menginginkan masyarakat yang ikut andil dengan aktif di dalamnya harus melibatkan mereka dari hulu hingga hilir. Jalannya PHBM selama lebih dari sepuluh tahun seharusnya mampu memberikan pengalaman penting bagi para *decision maker*.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Anderson, James E. 1990. *Public Policymaking: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin.
- Alam, Syamsu. 2009. *Ekonomi Sumberdaya Hutan*. Makassar : Unhas.
- Amal, Bakhrul. 2017. *Pengantar Hukum Tanah Nasional: Sejarah Politik dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Aziz. S.R, Abdul. 2003. *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bappenas. 2007. *Kumpulan Bahan Latihan Pemantauan dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas.
- Bungin, Burhan. 2011. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press
- Denzin, Norman K dan Lincoln, Yvonna S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, N. William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy Analysis An Introduction, second edition (terjemahan)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ealau, H. dan Prewitt, K. 1973. *Labyrinths of Democracy: Adaptations, Linkages, Representations, and Policies in Urban Politics*. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
- Easton, David. 1953. *The Political System: An Inquiry into The State of Political Science*. New York: Alfred A. Knopf.
- Herjanto, E. 2007. *Manajemen Operasi*. Jakarta: Grasindo
- Hidayat, R. 2017. *Political Devolution: Lessons From a Decentralized Mode of Government in Indonesia*. SAGE Open 7 (1): 2158244016686812.
- Hoogerwerf, A. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga

- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI
- Islamy, Irfan M. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Korten, David C Dan Sjahrir, (Ed). 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Obor
- Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong & Lexy, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Neumann, Roderick P dan Eric Hirsch. 2000. *Commercialisation of Non-Timber Forest Products: Review and Analysis of Research*. Bogor: Center for International Forestry Research.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Bina Aksara
- Purwanto, E.A dan Sulistyastuti D.R. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Subarsono, Agustinus. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan BANGSA*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Negara Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Titmuss, Richard, M. 1974. *Social Policy: An Introduction*. New York: Pantheon Press.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

- Wahab, Solichin A. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara
- Waskito dan Arnowo, Hadi. 2017. *Pertanahan Agraria dan Tata Ruang*. Jakarta: Kencana.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik (Teori Proses dan Studi Kasus)*. Jakarta: Buku Seru.
- Wirakusumah, Sambas. 2003. *Dasar-Dasar Ekologi, Menopang Pengetahuan Ilmu-Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

### **Jurnal dan Penelitian Ilmiah**

- Hidayat, N.C. 2015. Kemitraan kesatuan Pemangku Hutan (KPH) jember Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Makmur Desa Tugusari. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Hamidy, R. Zulkarnaini dan Z, Saam. 2011. Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Hutan Pasca Kegiatan HPH PT. Siak Raya Timber di Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau. *Jurnal Lingkungan Hidup*.5(02).
- Munandar, M. 2016. Valuasi Ekonomi pemanfaatan Hasil Hutan Yang Tidak Dapat Dipasarkan Pada Kawasan Hutan Lindung Taman Hutan Raya Sultan Adam Kalimantan Selatan. *Jurnal Hutan Tropis*. 4(2).

### **Artikel dari internet**

- Ali, Fidel. 2015. Indonesia Telah Kehilangan 40 Persen Hutannya. <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/11/19182121/Indonesia.Telah.Kehilangan.40.Persen.Hutannya>. [Diakses pada 20 Juni 2019]
- Kosasi, Felli. 2016. Perhutani Amankan Satu Truck Penuh Kayu Jati Hasil Curian. <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=21306>. [Diakses pada 22 Juni 2019]
- Nugroho, S.P. 2017. 2.341 kejadian Bencana, 377 Tewas dan 3,5 Juta Jiwa Mengungsi Akibat Bencana Tahun 2017. <https://www.bnpb.go.id/2341-kejadian-bencana-377-tewas-dan-35-juta-jiwa-mengungsi-dan-menderita-akibat-bencana-tahun-2017>. [Diakses pada 16 Juni 2018]

- Rajana. 2016. Jokowi Sebut 25 Ribu Desa di Indonesia Masih Masuk Kawasan Hutan. <https://www.liputan6.com/regional/read/2683794/jokowi-sebut-25-ribu-desa-di-indonesia-masih-masuk-kawasan-hutan>. [Diakses 20 Juni 2019]
- Supratiwi, F. 2017. Pembalakan liar rugikan Perhutani Jember Rp1,3 miliar. <https://www.antaraneews.com/berita/674243/pembalakan-liar-rugikan-perhutani-jember-rp13-miliar>. [Diakses 16 Juni 2018]
- Saichu, A. 2016. Pembalakan liar BKPH RPH amankan 1 truk jati curian. <https://memo-x.com/70973/bkphrph-ambulu-1truk-jati-curian.htm> [Diakses 17 Juni 2018]

### **Laporan dan Dokumentasi**

<https://www.bps.go.id/>

<http://www.menlhk.go.id/>

<http://www.perhutani.co.id/>

### **Peraturan Perundangan**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. *Kehutanan*. 30 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. 12 Agustus 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82. Jakarta.

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 682/KPTS/DIR/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)



LAMPIRAN

**Lampiran 6.1 Pedoman Wawancara****PEDOMAN WAWANCARA****anggota LMDH Harapan Makmur ( kelompok sasaran )**

1. Semenjak kapan bergabung dengan LMDH Harapan Makmur?
2. Apa saja yang telah dilakukan selama menjadi anggota LMDH?
3. Apakah ada uang yang dibayarkan kepada LMDH selama menjadi anggota?
4. Apa yang diketahui tentang program PHBM?
5. Bagaimana pembagian dana *sharing* yang selama ini berlangsung?
6. Bagaimana pengelolaan hutan Desa Sabrang sebelum adanya PHBM?
7. Bagaimana pemanfaatan hutan Desa Sabrang sebelum adanya program PHBM?
8. Sebelum adanya program PHBM apa saja pekerjaan anda?
9. Berapa pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut?
10. Setelah adanya program PHBM berapa petak lahan yang di dapat?
11. Bagaimana proses pelaksanaan program PHBM di Desa Sabrang?
12. Tanaman apa yang biasanya di tanam?
13. Berapa penghasilan tiap musim panen dari tanaman-tanaman tersebut?
14. Berapa tenaga kerja yang terlibat?
15. Apa saja manfaat secara ekonomi yang dirasakan dari adanya program PHBM?
16. Dari hasil program PHBM apa saja yang berhasil dibeli?
17. Selain hasil pengolahan lahan dari program PHBM, apakah ada jenis usaha atau pekerjaan lain?
18. Semenjak kapan menggeluti pekerjaan tersebut?
19. Bila ada, berapa pendapatan yang diperoleh?

**PEDOMAN WAWANCARA****Masyarakat Desa Sabrang ( diluar kelompok sasaran )**

1. Apakah yang diketahui tentang program PHBM?
2. Apa sebelumnya pernah bergabung menjadi anggota LMDH?
3. Apa saja pekerjaan yang saat ini digeluti?

4. Berapa pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut?
5. Apa perbedaan pemanfaatan hutan sebelum dan setelah adanya program PHBM?

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **Ketua LMDH Harapan Makmur**

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Sabrang?
2. Bagaimana awal mula berdirinya LMDH Harapan makmur?
3. Bagaimana pengelolaan hutan Desa Sabrang sebelum adanya program PHBM?
4. Bagaimana pemanfaatan hutan Desa Sabrang sebelum adanya program PHBM?
5. Apa perubahan yang terjadi semenjak adanya program PHBM terhadap perekonomian masyarakat di Desa Sabrang?
6. Bagaimana hubungan antara Perum Perhutani dengan LMDH Harapan Makmur?
7. Kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan bersama?
8. Apakah ada dari Perjanjian Kerjasama (PKS) yang belum dilaksanakan dengan baik?
9. Bagaimana pembagian dana *sharing* yang diterima oleh LMDH Harapan Makmur?
10. Telah dimanfaatkan untuk apa saja besaran dana *sharing* tersebut?
11. Apakah ada jenis usaha produktif lain yang dilakukan oleh LMDH?
12. Berapa pendapatan yang diperoleh LMDH dari usaha tersebut?
13. Bagaimana hubungan Pemerintah Desa Sabrang dengan LMDH, apakah ada kontribusi yang masuk ke kas Desa?

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **Kepala Desa Sabrang**

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Sabrang?
2. Bagaimana peran program PHBM terhadap perkembangan perekonomian masyarakat di Desa Sabrang?

3. Bagaimana hubungan Pemerintah Desa Sabrang dengan LMDH Harapan Makmur?
4. Apakah ada kontribusi dari LMDH ke kas Desa?

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **Ketua Perum Perhutani KPH Jember**

1. Bagaimana sejarah munculnya program PHBM?
2. Bagaimana awal mula program PHBM diterapkan di Perum Perhutani KPH Jember?
3. Bagaimana teknis pelaksanaan program PHBM?
4. Apa saja kontribusi yang harus diberikan LMDH terhadap Perum Perhutani dalam program PHBM?
5. Bagaimana sistem pembagian dana *sharing* terhadap LMDH?
6. Bagaimana keamanan tanaman pokok perhutani di wilayah hutan Sabrang?
7. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan guna mengendalikan tindakan melanggar aturan tersebut?
8. Bagaimana hubungan Perum Perhutani dengan LMDH Harapan Makmur dalam program PHBM yang telah berjalan semenjak tahun 2006?

**Lampiran 6.2 Dokumentasi**



Gambar 6.1 Wawancara dengan Bapak Harun Ketua LMDH Harapan Makmur



Gambar 6.2 Penyaduran berkas-berkas LMDH Harapan Makmur



Gambar 6.3 wawancara dengan Bapak Agus Kepala Sub Seksi Komunikasi Perusahaan Perum Perhutani KPH Jember



Gambar 6.4 Foto bersama Bapak Bambang Kepala Bagian Danru Polhutan Perum Perhutani KPH Jember



Gambar 6.5 Pengambilan data dari Perum Perhutani KPH Jember



Gambar 6.6 Rumah Bapak Kuseman



Gambar 6.7 Rumah Bapak Muji



Gambar 6.8 Rumah Bapak Agus



Gambar 6.9 Rumah Ibu Juma'ani



Gambar 6.10 Rumah Bapak Husen



Gambar 6.11 Kegiatan penyemaian bibit tanaman semangka

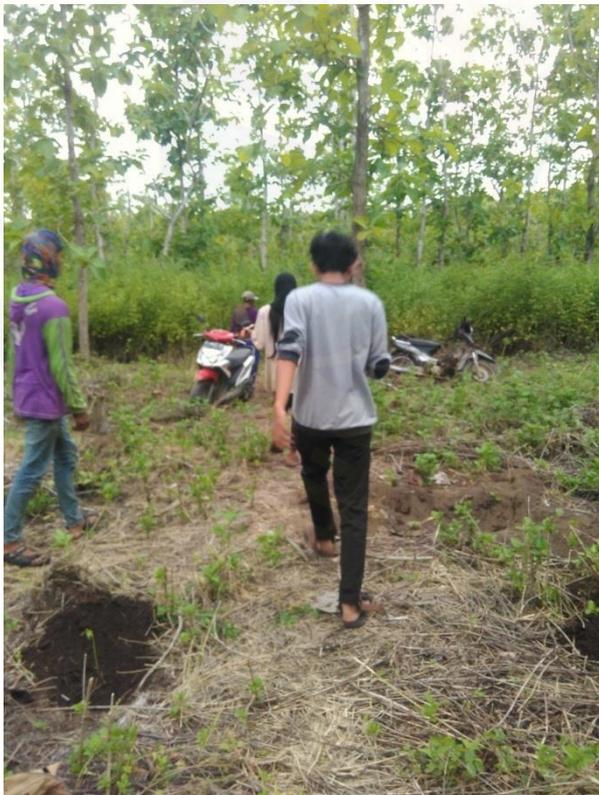


Gambar 6.12 Para petani semangka yang melepas lelah setelah panen



Gambar 6.13 Kegiatan penanaman tanaman pepaya di lahan rambahan

Peneliti sempat menelusuri kegiatan para perambah hutan, sedikit membantu mereka dalam berkegiatan agar mendapatkan informasi serta sudut pandang yang baru untuk kebutuhan penelitian.



Gambar 6.14 Masuk ke dalam semak di tengah hutan, mengetahui secara langsung kegiatan tersebut.

NO	Nama	Alamat	Simpunan	T.T.
0763	Butamin	Kebonsari Sbr RT/RW: 02/01	Rp.100.000	HL
0764	Sukoco	Ungkalan RT/RW:		HL
0765	Jarno	Watukebo RT/RW: 05/000 Pudung Sari	Rp.100.000	HL
0766	Boyadi	Kebonsari RT/RW: 02/05 Sabrang	Rp.100.000	HL
0767	Mat Sarimen	Krajan Kidul Sumberejo		HL
0768	Vemah	Bregod RT/RW: Sumberejo 3509120107700286	Rp.100.000	HL
0769	Hek Anom Sutoto	Ungkalan RT/RW: 02/026 Sabrang	Rp.100.000	HL
0770	Sainun bin Hajer	Ungkalan RT/RW: 02/06 Sabrang		HL

Gambar 6.15 Foto daftar anggota LMDH Harapan Makmur

Periksalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank

TANGGAL	SANDB	MUTASI	SALDO	VALIDASI
01.	1/07/2016	5000	0,00	
02.	18/07/2016	1051	2,000,000.00-	JIM1781L01
03.	27/07/2016	5058	5,177.32	SYBR1221P
04.	10/08/2016	5000	5,000.00-	SYBR1221P
05.	16/08/2016	1051	1,500,000.00-	JIM1781L01
06.	27/08/2016	5058	3,800.13	SYBR1221P
07.	18/09/2016	1051	5,000.00-	SYBR1221P
08.	27/09/2016	5058	2,894.84	SYBR1221P
09.	18/10/2016	1051	5,800.00-	SYBR1221P
10.	27/10/2016	5058	2,885.57	SYBR1221P
11.	16/11/2016	1051	5,800.00-	SYBR1221P
12.	28/11/2016	5058	2,888.88	SYBR1221P
13.	16/12/2016	1051	7,500.00-	SYBR1221P
14.	27/12/2016	5058	2,599.32	SYBR1221P
15.	28/12/2016	1051	1,000.00-	SYBR1221P
16.	4/01/2017	5000	42,710,843.00	JIM1781L01
17.	18/01/2017	1051	27,000,000.00-	JIM1781L01
18.	18/01/2017	5051	23,043.14	SYBR1221P
19.	18/01/2017	5000	4,908.63	SYBR1221P
20.	21/01/2017	5006	13,000,000.00-	JIM1781L01
21.	21/01/2017	1001	1,000.00-	SYBR1221P
22.	18/02/2017	1007	42,110,843.00	JIM0000225
23.	18/02/2017	5051	40,398.98	SYBR1221P
24.	11/03/2017	5000	1,012.19-	SYBR1221P
25.	24/03/2017	5000	5,000,000.00-	SYBR1221P
26.	01/04/2017	5058	7,000,000.00-	JIM1781L01
27.	01/04/2017	5000	1,000.00-	JIM1781L01
28.	10/03/2017	5000	10,000,000.00-	SYBR1221P
29.	16/03/2017	1051	6,000,000.00-	JIM1781L01
30.	16/03/2017	5051	33,191.21	JIM1781L01
			8,139.45-	SYBR1221P
			15,002,823.61	SYBR1221P

Gambar 6.16 rekening dana sharing LMDH Harapan Makmur tahun 2016-2017

Periksalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank

TANGGAL	SANDB	MUTASI	SALDO	VALIDASI
01.	27/03/2017	5058	1,500.00-	SYBR124P
02.	3/04/2017	5000	14,995,123.67	JIM1781L01
03.	15/04/2017	1051	6,995,123.67	SYBR1221P
04.	15/04/2017	5051	15,901.31	SYBR1222P
05.	27/04/2017	5058	9,007,844.72	SYBR124P
06.	15/05/2017	1051	9,011,444.59	SYBR1222P
07.	16/05/2017	5051	9,009,224.57	JIM1781L01
08.	11/06/2017	5000	4,009,224.57	SYBR124P
09.	21/06/2017	5058	4,001,124.57	SYBR1221P
10.	16/06/2017	1051	4,006,206.61	SYBR1222P
11.	16/06/2017	5051	4,005,371.99	JIM1781L01
12.	22/06/2017	5058	2,005,371.99	SYBR124P
13.	30/06/2017	5058	1,991,811.99	SYBR1221P
14.	16/07/2017	1051	2,481.19	SYBR1221P
15.	27/07/2017	5058	1,992,779.12	SYBR1221P
16.	11/08/2017	5000	992,779.14	JIM1781L01
17.	16/08/2017	1051	994,726.39	SYBR1221P
18.	28/08/2017	5058	987,226.39	SYBR124P
19.	16/09/2017	1051	988,271.62	SYBR1221P
20.	21/09/2017	5058	980,111.62	SYBR124P
21.	16/10/2017	1051	981,788.18	SYBR1221P
22.	21/10/2017	5058	974,288.18	SYBR124P
23.	16/11/2017	1051	975,325.40	SYBR1221P
24.	21/11/2017	5058	967,825.40	SYBR124P
25.	4/12/2017	1001	75,829,515.40	JIM0000225
26.	16/12/2017	1051	75,897,510.14	SYBR1221P
27.	16/12/2017	5051	75,889,911.19	SYBR1222P
28.	22/12/2017	5000	45,889,911.19	JIM1781L01
29.	21/12/2017	5058	45,882,411.19	SYBR124P
30.	15/01/2018	5000	20,882,411.19	JIM1781L01

Gambar 6.17 rekening dana sharing LMDH Harapan Makmur tahun 2017-2018

Periksalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank

TANGGAL	SANDB	MUTASI	SALDO	VALIDASI
01.	16/01/2018	1051	64,789.03	SYBR1221P
02.	16/01/2018	5051	12,957.61-	SYBR1222P
03.	21/01/2018	5058	20,896,741.61	SYBR124P
04.	6/02/2018	5000	2,000,000.00-	JIM1781L01
05.	16/02/2018	1051	18,922,709.37	SYBR1221P
06.	16/02/2018	5051	5,193.55-	SYBR1221P
07.	19/02/2018	5000	5,300,000.00-	JIM1781L01
08.	21/02/2018	5058	13,470,016.82	SYBR1221P
09.	27/02/2018	5000	10,000,000.00-	JIM1781L01
10.	16/03/2018	1051	10,007.11	SYBR1221P
11.	16/03/2018	5051	2,000.34-	SYBR1222P
12.	24/03/2018	5058	1,000.00-	SYBR124P
13.	16/04/2018	1051	3,474,041.19	SYBR1221P
14.	21/04/2018	5058	3,029.00-	SYBR1221P
15.	16/05/2018	1051	3,406,064.65	SYBR124P
			3,416,797.19	SYBR1221P
16.	26/05/2018	5058	1,000.00-	SYBR124P
17.	31/05/2018	5000	3,000,000.00-	JIM1781L01
18.	16/06/2018	1051	1,971.71	SYBR1221P
19.	27/06/2018	5058	7,500.00-	SYBR1221P
20.	16/07/2018	1051	410.88	SYBR1221P
21.	27/07/2018	5058	389,550.27	SYBR1221P
22.	16/08/2018	1051	416.51	SYBR1221P
23.	27/08/2018	5058	381,366.78	SYBR124P
24.	16/09/2018	1051	408.56	SYBR1221P
25.	27/09/2018	5058	382,375.34	SYBR1221P
26.	16/10/2018	1051	8,000.00-	SYBR124P
			374,375.34	SYBR1221P
			374,762.98	SYBR1221P

Gambar 6.18 rekening dana sharing LMDH Harapan Makmur tahun 2018

## 6.3 Surat Ijin Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818  
 Email : [penelitian.lp2m@unej.ac.id](mailto:penelitian.lp2m@unej.ac.id) - [pengabdian.lp2m@unej.ac.id](mailto:pengabdian.lp2m@unej.ac.id)

Nomor : 3938/UN25.3.1/LT/2018

17 September 2018

Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jember

Di

Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 3302/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 13 September 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Dimas Baskoro  
 NIM : 140910201042  
 Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat : Perum Pondok Gede DH/12-A Jember  
 Judul Penelitian : "Dampak Ekonomi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember"  
 Lokasi Penelitian : 1. Dinas Perhutani Kabupaten Jember  
 2. Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember  
 Lama Penelitian : 2 Bulan (20 September-20 November 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Ketua  
 Sekretaris II,



Dr. Susanto, M.Pd.

NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth

1. Kepala Perhutani Kab. Jember;
2. Kepala Desa Sabrang, Kec. Ambulu Kab. Jember;
3. Dekan FISIP Universitas Jember;
4. Mahasiswa ybs; ✓
5. Arsip.



CERTIFICATE NO : QMS/173

## 6.4 Surat Ijin penelitian Pemerintah Daerah kabupaten Jember Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada  
 Yth. Sdr. 1. Kepala Perum Perhutani KPH Jember  
 2. Camat Ambulu Kab. Jember  
 di -  
**JEMBER**

**SURAT REKOMENDASI**  
 Nomor : 072/2246/415/2018

Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;  
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal 17 September 2018 Nomor : 3938/UN25.3.1/LT/2018 perihal Penelitian

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama / NIM. : Dimas Baskoro / 140910201042  
 Instansi : FISIP Universitas Jember  
 Alamat : Perum Pondok Gede DH/12-A Jember  
 Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul :  
 "Dampak Ekonomi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember"  
 Lokasi : 1. Perum Perhutani KPH Jember  
 2. Kantor Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember  
 Waktu Kegiatan : September s/d Nopember 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember  
 Tanggal : 01-10-2018  
 An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
 KABUPATEN JEMBER  
 Kabid. Kajian Strategis dan Politis  
  
 ACHMAD NURHIDAYAT, S.Sos  
 Pembina  
 NIP. 19690912199602 1001

Tembusan :  
 Yth. Sdr. : 1. Ketua LP2M Universitas Jember;  
 2. Yang Bersangkutan.

